



LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2024

**SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hibah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Padang, 8 Mei 2025

Kepala Satuan Kerja,

Karnalis Kamaruddin, S.H, M.Si

NIP. 19680813 199103 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	6
RINGKASAN LAPORAN	7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	9
NERACA.....	10
LAPORAN OPERASIONAL	11
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	26
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA.....	61
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL.....	81
E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	94
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.....	17
Tabel 2. Penyisihan piutang tak tertagih	21
Tabel 3. Pengelompokan Aset Tetap	23
Tabel 4. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel 5. Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Revisi TA 2024.....	27
Tabel 6. Perbandingan estimasi dan realisasi pendapatan TA 2024	28
Tabel 7. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).....	29
Tabel 8. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	30
Tabel 9. Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023.....	31
Tabel 10. Perbandingan realisasi pendapatan per kabupaten/kota TA 2024 dan TA 2023	31
Tabel 11. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara per 30 September 2024	33
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023	33
Tabel 13. Perbandingan Anggaran Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023.....	34
Tabel 14. Rincian Pengembalian Belanja TA 2024.....	34
Tabel 15. Rincian Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS.....	35
Tabel 16. Rincian Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	35
Tabel 17. Rincian Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja.....	35
Tabel 18. Rincian Pengembalian Belanja Bahan.....	36
Tabel 19. Rincian Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	38
Tabel 20. Rincian Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	38
Tabel 21. Rincian Pengembalian Belanja Langganan Listrik.....	38
Tabel 22. Rincian Pengembalian Belanja Langganan Air	39
Tabel 23. Rincian Pengembalian Belanja Sewa	40
Tabel 24. Rincian Pengembalian Belanja Jasa Profesi	40
Tabel 25. Rincian Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	41
Tabel 26. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa.....	41
Tabel 27. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.....	42
Tabel 28. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45
Tabel 29. Rincian Pengembalian Belanja Paket Meeting Luar Kota	45
Tabel 30. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024	47
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023	48
Tabel 32. Rincian pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	48
Tabel 33. Perbandingan Anggaran dan Belanja Barang triwulan III TA 2024.....	49
Tabel 34. Rincian Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023	50
Tabel 35. Rincian Pengembalian Belanja Barang per kabupaten/kota TA 2024	50
Tabel 36. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024	59
Tabel 37. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023	59
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023	60
Tabel 39. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 40. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 41. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 42. Perbandingan Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 30 juni 2024 dan 2023	68
Tabel 43. Perbandingan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023.....	69
Tabel 44. Mutasi nilai persediaan.....	69
Tabel 45. Perbandingan Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023	70
Tabel 46. Mutasi nilai Tanah	70
Tabel 47. Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023	71
Tabel 48. Mutasi Peralatan dan Mesin	71
Tabel 49. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Intrakomptabel per 31 Desember 2024	72
Tabel 50. Rincian reklasifikasi aset tetap	72
Tabel 51. Perbandingan Saldo Gedung dan Bangunan per 30 september 2024.....	74
Tabel 52. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan.....	74
Tabel 53. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 september 2024.....	75
Tabel 54. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.....	75
Tabel 55. Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	76
Tabel 56. Mutasi Aset Tetap Tak Berwujud per 31 Desember 2024	76
Tabel 57. Daftar Website Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024	77
Tabel 58. Daftar Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024.....	78
Tabel 59. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	79
Tabel 60. Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	79
Tabel 61. Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	79
Tabel 62. Rincian Hibah yang Belum Disahkan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 63. Perbandingan Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor TA 2024 dan TA 2023	80
Tabel 64. Perbandingan Pendapatan TA 2024 dan TA 2023.....	81
Tabel 65. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang sudah disetor per 31 Desember 2024	82
Tabel 66. Rincian Mutasi Pendapatan	83
Tabel 67. Rincian Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu.....	83
Tabel 68. Rincian Belanja Pegawai TA 2024.....	85
Tabel 69. Mutasi Belanja Pegawai TA 2024	86
Tabel 70. Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2023	86
Tabel 71. Perbandingan Belanja Persediaan TA 2024 dan TA 2023	87
Tabel 72. Mutasi Beban Persediaan	87
Tabel 73. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024.....	88
Tabel 74. Mutasi Beban Persediaan TA 2024.....	89
Tabel 75. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024	89
Tabel 76. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024	90
Tabel 77. Rincian Mutasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024	91
Tabel 78. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024	91
Tabel 79. Rincian kegiatan non operasional per 30 juni 2024	92
Tabel 80. Rincian Transaksi Antar Entitas	95
Tabel 81. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain.....	95
Tabel 82. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain.....	96
Tabel 83. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	96
Tabel 84. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).....	96
Tabel 85. Rincian Pengesahan Hibah Langsung.....	98

Tabel 86. Mutasi Kenaikan dan Penurunan Ekuitas per 30 juni 2024	98
Tabel 87. Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat Bawaslu Prov Sumatera Barat	100
Tabel 88. Daftar Rekening penampung dana APBN (BNI) yang dikelola	103
Tabel 89. Daftar Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)	103
Tabel 90. Rincian Tindak Lanjut temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	107
Tabel 91. Daftar Pejabat Perbendahraan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat TA 2023	109
Tabel 92. Daftar PPK dan BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat per 30 juni 2024 ...	109



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

JL. PRAMUKA NO 11 PADANG

TELEPON 0751-7055302 , 7055301, FAXIMILE 0751-7055304

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 8 Mei 2025

Kepala Satuan Kerja,



Karnalis Kamaruddin, S.H, M.Si

NIP. 19680813 199103 1 008

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp708.208.293,00 berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp708.208.293,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp346.012.598.287,00 atau mencapai 90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp383.637.445.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp70.400.816.789,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp59.627.733.394,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.765.794.520,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.288.875,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp73.515.894,00 dan Rp70.327.300.895,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.624.846,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp344.099.606.504,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar

(Rp344.103.966.195,00). Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp180.881.252,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp343.918.725.252,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp76.694.941.590,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp343.918.725.252,00). kemudian dikurangi dengan koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp337.533.284.557,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp70.327.300.895,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

NAMA PERKIRAAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	58.990.050.061	67.439.128.199
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.2	637.683.333	354.426.667
Persediaan	C.3	0	2.808.502.000
Jumlah Aset Lancar		59.627.733.394	70.602.056.866
ASET TETAP			
Tanah	C.4	1.339.439.000	1.339.439.000
Peralatan dan Mesin	C.5	20.513.848.941	13.807.530.441
Gedung dan Bangunan	C.6	2.920.835.856	2.771.038.656
Aset Tetap Lainnya	C.7	4.000.000	4.000.000
Akumulasi Penyusutan	C.8	(14.030.329.277)	(11.913.234.688)
Jumlah Aset Tetap		10.765.794.520	6.008.773.409
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	708.749.970	708.749.970
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(701.461.095)	(609.433.850)
Jumlah Aset Lainnya		7.288.875	99.316.120
JUMLAH ASET		70.400.816.789	76.710.146.395
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.11	66.339.889	11.229.361
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.12	7.175.995	3.975.444
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		73.515.894	15.204.805
JUMLAH KEWAJIBAN		73.515.894	15.204.805
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	70.327.300.895	76.694.941.590
JUMLAH EKUITAS		70.327.300.895	76.694.941.590
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN		70.400.816.789	76.710.146.395

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 2023

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.624.846	3.919.477
Jumlah Pendapatan		2.624.846	3.919.477
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	24.402.688.055	15.806.640.527
Beban Persediaan	D.3	2.874.925.804	59.287.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	177.638.353.515	105.759.862.269
Beban Pemeliharaan	D.5	2.160.295.630	2.009.978.337
Beban Perjalanan Dinas	D.6	134.815.246.512	52.969.650.881
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.210.721.834	1.361.684.131
Jumlah Beban		(344.102.231.350)	(177.967.103.145)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(344.009.606.504)	(177.963.183.668)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	13.222.184	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	167.659.068	4.080.145
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		180.881.252	(4.114.255)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(343.918.725.252)	(117.967.297.923)
SURPLUS/DEFISIT - LO		(343.918.725.252)	(117.967.297.923)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2024 DAN 2023

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	76.694.941.590	2.231.757.078
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(343.918.725.252)	(177.967.297.923)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	17.800.000	62.500
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	1.600.000	0
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	16.200.000	0
Jumlah			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	337.533.284.557	253.091.185.799
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(6.367.640.695)	74.463.184.512
EKUITAS AKHIR	E.5	70.327.300.895	76.694.941.590

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
dan Profil
Entitas*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
17. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2021 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 5 Juli 2023 hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023; dan
19. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2023 tanggal 3 Juli 2023.

A.2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga pengawas pemilu yang terpercaya”

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya, adalah sebagai berikut:

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2021-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur

Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2021-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menggantikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 08 April 2022.

Dalam SOTK yang baru Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di kategorikan kelas A, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi; dan
- e. Pejabat fungsional.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat per 30 juni 2024 posisi yang terpenuhi yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Organisasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	SK
1.	Karnalis Kamaruddin, S.H., M.Si	Kepala Sekretariat	0591/BAWASLU/SJ/ KP.04.00/II/2017 tanggal 13 Mei 2017
2.	Mafral, S.E., M.M	Kepala Bagian Administrasi	2133/KP.04.00 /SJ/06/2022 tanggal 17 September 2022
3.	Drs. Andi Bastian, M.Si	Kepala Bagian Pengawasan	0217/BAWASLU/SJ/ KP.04.00/II/2021 tanggal 07 Februari 2021
4.	Eriyanti, S.H., M.Si	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	1141/BAWASLU/SJ/ KP.04.00/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021
5.	Roza Molina, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Hukum, Hubungan	1141/BAWASLU/SJ/ KP.04.00/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2022

		Masyarakat, Data, dan Informasi	
6.	Nurelida, A.Md	Pejabat Fungsional	0507/Bawaslu/SJ/KP.05.01/II/2021

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur dimana seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara system elektronik pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Laporan keuangan SAKTI dihasilkan dari Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) yang sumber datanya berasal dari seluruh modul pada aplikasi SAKTI yaitu mulai dari Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Pembayaran, Modul Pelaporan, Modul Persediaan, dan Modul Aset Tetap

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar

nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited) Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi jangka pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penghitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penyisihan piutang tak tertagih

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 persen
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama dilakukan pelunasan	10 persen
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50 persen
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	100 persen

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

3. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusunan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - Tanah
 - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat
- Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Barupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Pengelompokan Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

4. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

5. Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraaan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tabel 4. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset lain lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sampai dengan revisi ke-sembilan, revisi dilakukan adanya:

1. Revisi kesatu pada tanggal 1 Februari 2024 merupakan revisi untuk automatic adjustment;
2. Revisi kedua pada tanggal 20 Februari 2024 merupakan revisi penyesuaian halaman III DIPA;
3. Revisi ketiga pada tanggal 20 Mei 2024 merupakan revisi optimalisasi anggaran prioritas nasional;
4. Revisi keempat pada tanggal 28 Mei 2024 merupakan revisi penyesuaian halaman III DIPA.
5. Revisi kelima pada tanggal 30 Juli 2024 merupakan revisi DJA untuk PSU dan asistensi pencantuman anggaran hibah
6. Revisi keenam pada tanggal 29 Agustus 2024 merupakan revisi tingak kanwil untuk halaman III DIPA dan pendetailan anggaran hibah
7. Revisi ketujuh pada tanggal 28 Oktober 2024 merupakan revisi DJA optimalisasi anggaran prioritas nasional, relaksasi automatic adjustment dan pemenuhan gaji
8. Revisi kedelapam pada tanggal 11 November 2024 merupakan revisi DJA optimalisasi anggaran dan pengadaan MCU
9. Revisi kesembilan pada tanggal 28 November 2024 merupakan revisi DJA penghematan perjalanan dinas
10. Revisi kesepuluh pada tanggal 2 Desember 2024 merupakan revisi kanwil penyesuaian anggaran hibah dengan pedoman 272 dan pengurangan pagu hibah
11. Revisi kesebelas pada tanggal 20 Desember 2024 merupakan revisi kanwil pengurangan pagu hibah
12. Revisi duabelas pada tanggal 27 Desember 2024 merupakan revisi pengurangan pagu hibah
13. Revisi ketigabelas pada tanggal 30 Januari 2025 merupakan revisi kanwil untuk penyelesaian pagu minus dan penambahan pagu hibah

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Tabel 5. Perbandingan Pagu Awal dan Pagu Revisi TA 2024

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai	18,415,462,000	27,213,051,000
Belanja Barang	201,273,702,000	349,230,390,000
Belanja Modal	2,354,500,000	7,194,004,000
TOTAL ANGGARAN	222,043,664,000	383,637,445,000

B1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp708.208.293,00 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi dan realisasi pendapatan satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan estimasi dan realisasi pendapatan TA 2024

Uraian	Estimasi 2024	Realisasi 2024	% Realisasi Anggaran
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	13,222,184	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	3,326,842	-
Pendapatan Penyelesaian Denda Pekerjaan Pemerintah	-	449,592	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	691,209,675	-
Jumlah	-	708,208,293	-

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp708.208.293,00 merupakan PNPB Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.222.184,00 dengan nomor NTPN 60AC30NA04J32C4U merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan peralatan dan mesin melalui lelang non eksekusi dengan nomor risalah lelang 231/03.01/2024-01 tanggal 7 Juni 2024.
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp3.326.842,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No	Kabupaten/Kota	NTPN	Tanggal setor	Nominal
1	Kab 50 Kota	0CE1E6U8EU5CPQFR	26-Jan-24	33,357
2	Kab Padang Pariaman	F187A1JNFUN5FR1P	29-Jan-24	40,560
3	Kab Sijunjung	6C0A63CIFJRUGBOR	30-Jan-24	5,228
4	Kota Padang	9FDD96U8EUHE6IAL	31-May-24	941,565
5	Kota Padang Panjang	F86F13CIFKA1KR3B	3-Jun-24	97,497
6	Kota Padang Panjang	474F048VVF62O6JD	30-Sep-24	391
7	Kota Bukittinggi	AF4B461QV41M9MON	20-Jun-24	1,556
8	Kab Solok	395D22G4VPO5PHML	21-Jun-24	40,000
9	Kab Tanah Datar	D59536U8EU52SN6N	16-Jan-24	143,560
10	Kab Tanah Datar	8D0AE7QLUPBSNLAT	8-Aug-24	341,551
11	Kec Payakumbuh Timur	978693CIFJR64MHT	4-Jan-24	1,508
12	Kec Pulau Punjung	98D5D55DF0NFJDJT	5-Jan-24	1,139
13	Kecamatan Timpeh	049010N9VRRHICPQ	5-Jan-24	1,338
14	Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	29-May-24	699,500
15	Kab Pasaman Barat	8624E5UFPP2OTBUQ/1	30-Sep-24	8,674
16	Kab Solok Selatan	0640E0NA0446FI02	10-Jan-24	97,532
17	Kab Kepulauan Mentawai	A82D061QV3IPPVCA	19-Jan-24	224,371
18	Kab Pasaman Barat	11D571JNFV8ALU4A	8-Jul-24	162,719
19	Kec Padang Panjang Barat	7F2551JNFVNTJ40L	30-Dec-24	6,083
20	Kec Padang Panjang Timur	722541JNFVNTJ46A	30-Dec-24	5,565
21	Kab 50 Kota	F54F31JNFVNVQAGV	31-Dec-24	153,621
22	Kec Padang Panjang Barat	1985B1JNFVNVQAQK	31-Dec-24	5,668
23	Kec Padang Panjang Timur	545183CIFKSOKATP	31-Dec-24	13,228
24	Kab Pesisir Selatan	8F27D6U8EV6A8B23	31-Dec-24	76,326
25	Kab Pasaman Barat	4AC757NAPH18PC5M/1	31-Dec-24	9,098
26	Kab Pasaman Barat	4E6D05UFPRSFVMRF/1	31-Dec-24	159,289
27	Kab Pasaman Barat	62E2645KQ6NN5CJP/1	31-Dec-24	27,180
28	Kab Pasaman Barat	650F15UFPRSFVCLP/1	31-Dec-24	9,554
29	Kab Pasaman Barat	945527NAPH18PC70/1	31-Dec-24	10,761
30	Kab Pasaman Barat	B17DA5UFPRSFVCI9/1	31-Dec-24	1,628
31	Kab Pasaman Barat	BA25F7NAPH18PCOG/1	31-Dec-24	3,828
32	Kab Pasaman Barat	C9307397AC5AOC92/1	31-Dec-24	141
33	Kab Pasaman Barat	E3EE25UFPRSFVC9R/1	31-Dec-24	1,258
34	Kab Pasaman Barat	E50C62CPQHIUBCL6/1	31-Dec-24	1,568.00
Jumlah				3,326,842

3. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp449.592,00 merupakan denda yang muncul akibat keterlambatan penyelesaian kontrak nomor 009/Bawaslu-SB/SP/JS/09/2024 Pengadaan Pakaian Dinas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
4. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.222.184,00 dengan nomor NTPN 60AC30NA04J32C4U merupakan pendapatan yang diperoleh dari lelang non eksekusi dengan nomor risalah lelang 231/03.01/2024-01 tanggal 7 Juni 2024.
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar

Rp691.209.675,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Uraian	NTPN	Nilai
1	Kab Solok	B6E902G4VP8NIOR8	215,492,994
2	Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	241,386,894
3	Kab Solok Selatan	381DE3CIFJRBMGKD	60,298,250
4	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	9,365,688
5	Kab Tanah Datar	A032C7QLUONF9LNS	91,927,739
6	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	3,000
7	Kab Padang Pariaman	CADF255DF90N3D0H	900,000
8	Kab Solok	7CFEB1JNFUN6QLT9	1,805,000
9	Kab Agam	C67061JNFUPV7KM9	1,032,190
10	Kota Payakumbuh	E592555DF96EE4J0	7,063,000
11	Kota Padang Panjang	DA89248VVEK8G5LQ	48,000
12	Kota Solok	24EA20NA04CU2CO9	1,175,000
13	Kota Solok	DFFAF1JNFVB5SKNG	1,231,770
14	Kota Sawahlunto	9E8F77QLUP0NARA4	2,500,000
15	Kota Payakumbuh	B01F93CIFK76QSPV	9,500,000
16	Kab Pasaman	A0EEC48VVEPRQ7LB	5,700,000
17	Kab Pasaman	DCAE748VVF2N9041	380,000
18	Kab Pasaman Barat	CF9541JNFV2LHM9F	14,000,000
19	Kab Kepulauan Mentawai	3018448VVET2NRMO	27,400,150
Jumlah			691,209,675

Bukti setor/Simponi penerimaan negara atas pendapatan satuan kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 terlampir pada **Lampiran I**.

Pendapatan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.222.184,00, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp2.842.046,00, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp691.209.675,00. Realisasi pendapatan untuk periode 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 18.963 persen dibanding tahun sebelumnya. Perbandingan pendapatan sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3,326,842	-	100%
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	13,222,184	-	100%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	449,592		
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	691,209,675	3,710,145	-
Jumlah	708,208,293	3,710,145	18,988

Perbandingan realisasi pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 untuk masing masing provinsi dan kabupaten/kota dirincikan sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan realisasi pendapatan per kabupaten/kota TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	13,671,776	-
Kabupaten Padang Pariaman	940,560	-
Kabupaten 50 Kota	186,978	1,255,000
Kabupaten Pasaman	248,166,394	-
Kabupaten Agam	1,032,190	-
Kabupaten Solok Selatan	60,395,782	-
Kabupaten Solok	217,337,994	-
Kabupaten Pasaman Barat	14,395,698	-
Kabupaten Dharmasraya	2,477	-
Kabupaten Kep. Mentawai	27,624,521	-
Kabupaten Tanah Datar	92,412,850	-
Kabupaten Sijunjung	5,228	-
Kabupaten Pesisir Selatan	76,326	-
Kota Padang	10,310,253	1,915,145
Kota Pariaman	-	-
Kota Padang Panjang	176,432	-
Kota Sawahlunto	2,500,000	-
Kota Bukittinggi	1,556	-
Kota Payakumbuh	16,564,508	450,000
Kota Solok	2,406,770	90,000
Jumlah	708,208,293	3,710,145

B. Belanja

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp346.012.598.287,00 atau 90 persen dari anggaran belanja sebesar Rp383.637.445.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024

Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	27,213,051,000	24,403,406,184	90%
Belanja Barang	349,230,390,000	314,959,802,403	90%
Belanja Modal	7,194,004,000	6,649,389,700	92%
Jumlah Belanja Kotor	383,637,445,000	346,012,598,287	90%

Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	24,403,408,115	15,812,244,095	54%
Belanja Barang	317,959,818,705	166,161,151,157	91%
Belanja Modal	6,649,389,700	2,100,237,064	217%
Jumlah Belanja Kotor	349,012,616,520	184,073,632,316	90%
Pengembalian Belanja	3,000,018,233	1,591,863,213	88%
Jumlah Belanja	346,012,598,287	182,481,769,103	90%

Realisasi belanja per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 90% dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 54 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 disebabkan oleh penambahan staf sekretariat bawaslu provinsi Sumatera Barat dan sekretariat Bawaslu kabupaten/kota se Sumatera Barat yang mengakibatkan pembayaran Gaji PNS dan PPPK bulan Januari s.d Desember 2024 meningkat.
2. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 91 persen dibandingkan per 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan dan perjalanan dinas untuk memfasilitasi pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024.

3. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 217 persen dibandingkan per 31 Desember 2023. Kenaikan disebabkan oleh penambahan staf yang mengakibatkan kenaikan kebutuhan peralatan dan kenaikan anggaran belanja modal yang mengakibatkan realisasi belanja modal meningkat.

Perbandingan anggaran belanja modal tahun anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perbandingan Anggaran Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Anggaran 2024	Anggaran 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal	7,194,004,000	2,161,488,000	232.83%

Realisasi belanja negara sebesar Rp346.012.598.287,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp349.012.616.520,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp3.000.018.233,00. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Pengembalian Belanja TA 2024

Akun	Rincian	Jumlah (Rp)
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,931
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	13,419,574
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,200,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	205,200
521211	Belanja Bahan	263,071,692
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	120,848,394
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,694,301
522111	Belanja Langganan Listrik	9,940,775
522113	Belanja Langganan Air	1,622,650
522141	Belanja Sewa	198,722,500
522151	Belanja Jasa Profesi	13,350,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	11,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,839,213
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,830,962,383
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	509,135,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,004,620
Total		3,000,018,233

Pengembalian belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000.018.233,00

dirincikan sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp1.931,00 merupakan pengembalian atas pembayaran gaji Pegawai/Prajurit TNI/Anggota Polri senilai Rp1.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS

No	No SP2D	Tanggal	Nominal
1	240101303002134	30-Apr-24	722
2	240101303002135	30-Apr-24	573
3	240101303008131	18-Dec-24	636
Jumlah			1,931

2. Pengembalian belanja keperluan perkantoran sebesar Rp13.419.574,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	17D7B45KQ06OROK	30-May-24	352,150
2	00B1D397A6ETA8R1	19-Jun-24	1,000,000
3	402895UFPM6LJTBL	24-Jun-24	750,000
4	B156F0JUQMJS2QPB	10-Jun-24	113,197
5	B62601GCAH8B8U8E	13-Jun-24	729,988
6	BE5C12CPQBT3VTAD	25-Jun-24	450,000
7	C6BFF45KQ132UQ5N	25-Jun-24	72,000
8	E419E5229RJVLKED	21-Jun-24	177,000
9	BAB932CPQCN1P4OI	6-Jul-24	2,252,300
10	9D5965229SL2E6SB	1-Aug-24	3,320,189
11	7D7E71GCAJ0CCJF1	1-Aug-24	2,777,750
12	EF6820JUQPEP6PB5	11-Sep-24	1,425,000
Total			13,419,574

3. Pengembalian belanja honor operasional satuan kerja sebesar Rp1.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	E6F641GCAIBGQ6QR/1	15-Aug-24	1,200,000
Total			1,200,000

4. Pengembalian belanja barang operasional lainnya sebesar Rp205.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	OAC8B0JUQSE5HH7M	31-Dec-24	205,200
Jumlah			205,200

5. Pengembalian belanja bahan sebesar Rp263.071.692,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Pengembalian Belanja Bahan

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	546CF6QT9E1NCP01	1-Apr-24	2,010,750
2	0FB522CPQ95PBP18	1-Apr-24	2,448,000
3	A5BDC1GCAF9O8JAB	4-Apr-24	38,205
4	B218B5229OSUIP3A	1-Apr-24	60,000
5	C1E365229OSUIOQ5	1-Apr-24	455,000
6	929FB7NAPAGAFOHC	31-May-24	1,250,000
7	1EE6E7NAPBCKIQ6Q	25-Jun-24	2,251,500
8	2E9615UFPM62HAIK	20-Jun-24	689,000
9	04B955UFPM26GQO6	10-Jun-24	100,000
10	4BA687NAPBARB9D8	20-Jun-24	255,000
11	4E6B65229RJVLKET	21-Jun-24	1,590,000
12	4F6AC1GCAHANITBJ	24-Jun-24	2,025,000
13	6C6345UFPM62H8TM	19-Jun-24	134,000
14	6CBEE2CPQBSGT94E	20-Jun-24	2,878,000
15	7A14B7NAPB923U9B	13-Jun-24	90,000
16	8AC4A1GCAH68FQOT	10-Jun-24	1,050,000
17	8DBEA45KQ132UQ6F	25-Jun-24	7,800,000
18	8DE0945KQ119N8L9	19-Jun-24	35,000
19	8F8D32CPQBSQEKDL	21-Jun-24	1,675,000
20	9E97C397A6ETA8PO	19-Jun-24	176,000
21	14D972CPQBSGTAJD	20-Jun-24	50,000
22	42A5C6QT9GQ85Q68	25-Jun-24	4,560,000
23	49DE91GCAHA4G9G5	20-Jun-24	1,175,000
24	57C5A6QT9GOOFKE9	21-Jun-24	2,703,000
25	68E8D397A6ETA95E	20-Jun-24	1,310,000
26	80CFE45KQ119N99E	20-Jun-24	1,175,000
27	0350D1GCAHANITBV	24-Jun-24	1,420,000
28	5964B7NAPB923UAV	13-Jun-24	1,240,000
29	8388C7NAPBARBAFT	20-Jun-24	795,000
30	A232A5229RJM49F3	20-Jun-24	1,970,000
31	AA7455229RJM499U	20-Jun-24	2,130,000
32	ADC4B0JUQMLURU6G	13-Jun-24	2,744,000
33	AEDAD7NAPBBEDTBN	24-Jun-24	90,000
34	AF4F445KQ0VGFU4F	13-Jun-24	4,664,000
35	C453E5229RFQ3QPH	10-Jun-24	1,275,000
36	CB89B0JUQMOB5TAF	25-Jun-24	710,000
37	CEDF82CPQBSGT98G	20-Jun-24	10,050,000
38	DD9D22CPQBT3VTA7	25-Jun-24	300,000
39	E1FB76QT9GOOFKFI	21-Jun-24	710,000
40	E7AA65229RHSSUBO	13-Jun-24	355,000
41	E38515229RJM48K9	19-Jun-24	2,750,000
42	FDADB45KQ0VGFU8P	13-Jun-24	4,313,000
43	59A420JUQMR11QVE	2-Jul-24	1,750,000
44	976BE397A79E64K6	8-Jul-24	670,600

45	89B015UFPN0JD4NQ	8-Jul-24	940,400
46	F5BAD7NAPC5C74PR	8-Jul-24	795,000
47	818B32CPQCN1P4S7	8-Jul-24	100
48	955307NAPCC7L6MR	31-Jul-24	5,569,500
49	3BB70397A7G9K6PT	31-Jul-24	9,237,460
50	5A42C6QT9HPR86RP	31-Jul-24	25,892,360
51	E889B0JUQODVVGKS	1-Aug-24	752,500
52	9BDBB5UFPNSADGLA	1-Aug-24	1,975,300
53	FAF5445KQ2NHJGLP	1-Aug-24	20,372,400
54	452E47NAPD137JGV	1-Aug-24	850,000
55	80FC97NAPD137JP6	1-Aug-24	252,000
56	EDB8B0JUQODVVJST	1-Aug-24	7,342,500
57	49D9A397A8556K55	1-Aug-24	1,815,000
58	6CCB06QT9IEMQK75	1-Aug-24	850,000
59	5780645KQ2NHJK82	1-Aug-24	650,000
60	BEE171GCAK1OMD6R	16-Sep-24	30,850,500
61	664DB5229UBAADQQ	16-Sep-24	2,915,000
62	8FABF0JUQPF9DQV	16-Sep-24	2,337,500
63	283995229UBAADS1	18-Sep-24	1
64	961C12CPQEKEKK6L	15-Sep-24	4,131,000
65	1C91D6QT9JGCLK71	15-Sep-24	24,239,000
66	5CB6A5229UCGF857	17-Sep-24	255,000
67	6C7E645KQ3QN4QB3	19-Sep-24	885,000
68	AABA41GCAK3HTQLD	19-Sep-24	1,347,000
69	6596B1GCAK3HTQSI	19-Sep-24	5,425,000
70	57A54397A98ANQVU	19-Sep-24	3,925,200
71	10AFF0JUQPJHR6NP	27-Sep-24	300,000
72	0F6865UFPP1S97DN	27-Sep-24	300,000
73	B0CB72CPQEOAL7HR	27-Sep-24	300,000
74	A9A62397A9AN27JD	27-Sep-24	345,000
75	01E6A0JUQPJHR8T6	27-Sep-24	1,871,875
76	B830F0JUQPJHRBBT	27-Sep-24	23,631,000
77	6AC4C2CPQEP791LL	30-Sep-24	953,500
78	0EB410JUQPKF21L	30-Sep-24	5,845,541
Jumlah			263,071,692

6. Pengembalian belanja honor output kegiatan sebesar Rp120.848.394,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	31C4C397A7BQGEEC	17-Jul-24	3,300,000
2	74A646QT9HPR86R2	31-Jul-24	106,655,894
3	5EDF745KQ2VJ6KAV	29-Aug-24	1,100,000
4	44D9A0JUQPE646S0	10-Sep-24	300,000
5	6AE260JUQPFLQK6R	15-Sep-24	3,600,000
6	8EE7D1GCAK1OMDQA	16-Sep-24	150,000
7	A3F3E45KQ3PGVPUN	16-Sep-24	1,200,000
8	04E88397A98ANQHD	19-Sep-24	300,000
9	68AAC45KQ3QN4R26	19-Sep-24	1,000,000
10	CC6CA5UFPP1S9BB5	27-Sep-24	2,642,500
11	168E945KQ3PQGV0G/	30-Sep-24	600,000
Total			120,848,394

7. Pengembalian belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp22.694.301,00 dengan rincian

Tabel 21. Rincian Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	1E0957NAPBARBAHN	20-Jun-24	120,000
2	408B1397A6ETAHHS	20-Jun-24	100,000
3	C6E4F0JUQMNO3AIA	20-Jun-24	100,000
4	B7DC32CPQDIOPGM8	1-Aug-24	22,274,301
5	1FDE71GCAK3HTR5F	19-Sep-24	100,000
Total			22,694,301

8. Pengembalian belanja langganan listrik sebesar Rp9.940.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Pengembalian Belanja Langganan Listrik

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	81B690JUQLT77OIC	30-May-24	558,014
2	3B8637NAPBCKIQ64	25-May-24	412,635
3	67EF75229RHJBLNB	13-Jun-24	23,793
4	69C3A5UFPM62H8QN	19-Jun-24	3,000
5	69CB90JUQMNO3AHH	20-Jun-24	1,000,000
6	569DE45KQ119N9DJ	20-Jun-24	298,500
7	48769397A6F6RKE0	21-Jun-24	621,000
8	BD5F02CPQBT3VTA1	25-Jun-24	950,000
9	BFB9C5UFPM62H95Q	20-Jun-24	760,700
10	CDE9D6QT9GMLMU7O	13-Jun-24	203,250
11	CE1CB0JUQMNO394V	20-Jun-24	679,883
12	8365C7NAPC5C74ML	8-Jul-24	745,500
13	BFBB76QT9HPR86O6	31-Jul-24	810,000
14	AE632397A7G9K6S6	31-Jul-24	2,463,500
15	59C417NAPD137JJI	1-Aug-24	411,000
Total			9,940,775

9. Pengembalian belanja langganan air sebesar Rp1.622.650,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Pengembalian Belanja Langganan Air

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	51DC8397A5KCEOJ	30-May-24	240,000
2	30C8F5UFPM499U86	13-Jun-24	97,650
3	76BE745KQ11J8KE5	21-Jun-24	114,600
4	C6EB36QT9GQ85Q60	25-Jun-24	312,400
5	F8BC445KQ119N952	20-Jun-24	200,000
6	C8CC55229RFQ3QON	10-Jun-24	8,300
7	DB7157NAPCC7L6Q8/1	15-Aug-24	649,700
Total			1,622,650

10. Pengembalian belanja sewa sebesar Rp198.722.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Pengembalian Belanja Sewa

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	2ECA42CPQ95PBORE	1-Apr-24	6,000,000
2	2EB8445KQ119N8LS	19-Jun-24	2,300,000
3	7C6731GCAH8B8U4P	13-Jun-24	3,900,000
4	15E405229RJVLKDN	21-Jun-24	5,773,500
5	77E6A2CPQBSGT8PV	19-Jun-24	300,000
6	93CA15UFPM62H8JM	19-Jun-24	2,000,000
7	604D05229RHSSU67	13-Jun-24	2,000,000
8	4062A6QT9GOEU9CJ	20-Jun-24	1,000,000
9	8077E1GCAHA4G9FR	20-Jun-24	550,000
10	962225229RJM48RR	19-Jun-24	1,300,000
11	B6E6E5UFPM62H97D	20-Jun-24	1,500,000
12	E1983397A6ETA9EC	20-Jun-24	1,500,000
13	F4E4E6QT9GMLMU9K	13-Jun-24	2,100,000
14	F769F7NAPBARBAFM	20-Jun-24	880,000
15	FDB182CPQBU0JI2J	24-Jun-24	108,160,000
16	2FD481GCAHDDEQVI	2-Jul-24	2,500,000
17	84F442CPQCN1P4L4	8-Jul-24	3,840,000
18	C235E6QT9HIVQ4RF	8-Jul-24	1,750,000
19	D60DF7NAPCC7L6M4	31-Jul-24	3,400,000
20	79C3E5229SL2E6NO	31-Jul-24	6,320,000
21	30EA245KQ2NHJGLH	1-Aug-24	20,000,000
22	A06F05UFPNSADJLH	1-Aug-24	2,000,000
23	12E4C5229T9U0JU6	1-Aug-24	4,150,000
24	ABDFD7NAPE2FHDP5	16-Sep-24	1,100,000
25	3D077397A96R1K6P	15-Sep-24	8,200,000
26	386AF7NAPE32JPUO	16-Sep-24	725,000
27	22721397A98ANQEF	19-Sep-24	14,000
28	4BFB41GCAK5U87KL	27-Sep-24	500,000
29	429677NAPE6L38SE	27-Sep-24	1,460,000
30	59DF70JUQPKEF19Q	30-Sep-24	1,300,000
31	BF0165UFPP1S9BC1/1	30-Sep-24	2,200,000
Total			198,722,500

11. Pengembalian belanja jasa profesi sebesar Rp13.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Pengembalian Belanja Jasa Profesi

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	D53687NAP8K3POTF	1-Apr-24	200,000
2	7E2BF5UFPM26GQNR	10-Jun-24	400,000
3	559051GCAHAE1KD9	21-Jun-24	600,000
4	982707NAPBARB93V	20-Jun-24	300,000
5	A54B47NAPBARB9E1	20-Jun-24	400,000
6	C0FFE1GCAHANITBH	24-Jun-24	600,000
7	C490B5229RHSSU5B	13-Jun-24	200,000
8	D31801GCAHANITA3	25-Jun-24	7,200,000
9	9723B7NAPCC7L6N4	31-Jul-24	200,000
10	C376C2CPQCTT76N8	31-Jul-24	3,250,000
Jumlah			13,350,000

12. Pengembalian belanja jasa lainnya sebesar Rp11.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Pengembalian Belanja Jasa Lainnya

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	9D101397A6ETA93M	20-Jun-24	1,500,000
2	9E1FF5229RHSSU5H	13-Jun-24	750,000
3	BA6727NAPB6VAQNJ	10-Jun-24	1,500,000
4	D9C9A5229QP58OFD	31-May-24	1,500,000
5	5A7706QT9EJU3F8U	26-Apr-24	500,000
6	0EF7F7NAP8K3POUE	1-Apr-24	3,750,000
7	C6F3745KQ2NHJK03	1-Aug-24	1,500,000
Jumlah			11,000,000

13. Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp2.839.213,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa

No	NTPN	Tanggal	Jumlah
1	44AA76QT9FPEVBK3	15-May-24	211,291
2	6406E45KQ1UQ01F6	19-Jul-24	100,000
3	3241145KQ1UQ01G1	19-Jul-24	100,000
4	8C3510JUQNL8C1HL	19-Jul-24	30,000
5	4122F1GCAJ0CCT5O	3-Aug-24	5,000
6	9360A1GCAJ0CCT5S	3-Aug-24	20,000
7	4851A5229TDQ1SN2	15-Aug-24	130,000
8	B09EC1GCAK6HAOG4/1	30-Sep-24	150,000
9	6CBCF2CPQFKU9NVA	25-Oct-24	1,922,522
10	387C46QT9LECJNS5	22-Nov-24	92,500
11	69B5145KQ5N7CNT9	22-Nov-24	75,900
12	253066QT9MESCL37	31-Dec-24	2,000
Total			2,839,213

14. Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.830.962.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

No	NTPN	Tanggal Setor	Nominal
1	1C5AC0JUQKU78FCJ	26-Apr-24	1,200,000
2	4779F7NAP8K3POS9	1-Apr-24	2,405,000
3	71A432CPQ9S4LIME	4-Apr-24	4,160,000
4	58E2F397A4LCFFAS	26-Apr-24	6,100,000
5	E84EBOJUQK10HP1S	1-Apr-24	10,000
6	5BF7F397A4LCFFDS	26-Apr-24	500,000
7	657A30JUQKU78FJT	26-Apr-24	600,000
8	0B0A9397A5KCEODI	31-May-24	1,560,000
9	A39052CPQB201OLC	30-May-24	2,000,000
10	F9B512CPQATGUC9A	16-May-24	600,000
11	18B286QT9GOEU8M7	19-Jun-24	100,000
12	0A3982CPQBSGT96S	20-Jun-24	13,640,000
13	0B0411GCAHA4G8SA	19-Jun-24	72,000
14	0E2E95UFPM6C2KDS	21-Jun-24	17,550,000
15	1FDDE1GCAHANITBS	24-Jun-24	8,470,000
16	2C8B82CPQBSGT9H7	20-Jun-24	3,100,000
17	2F80E5229RHSSUBB	13-Jun-24	16,090,000
18	3EF190JUQMNO3AG6	20-Jun-24	1,000,000
19	5A28A6QT9GOOFKF6	21-Jun-24	8,560,000
20	6CEB6397A6ETA98S	20-Jun-24	5,512,000
21	08F302CPQBUA4Q4K	25-Jun-24	116,185,000
22	8E7BE1GCAHBTNQ4P	25-Jun-24	112,054,500
23	9FB5745KQ119N94O	20-Jun-24	8,436,000
24	18A7E2CPQBT3VTBT	24-Jun-24	5,770,000
25	20C7C5229RJVLKEO	21-Jun-24	49,893,500
26	25C257NAPB6VAQPR	10-Jun-24	1,500,000
27	43A406QT9GOEU9FC	20-Jun-24	1,700,000
28	51B8B0JUQMNO3AGF	20-Jun-24	720,000
29	60A805229RJM4AGP	20-Jun-24	810,000
30	75E095229RJM48Q6	19-Jun-24	740,000
31	79F1C5UFPM62HAGU	20-Jun-24	540,000
32	80D5B1GCAHAE1K6O	21-Jun-24	21,300
33	97BC7397A6D42UA9	13-Jun-24	16,280,000
34	226FB7NAPBBEDTBU	24-Jun-24	8,640,000
35	381D15229RJVLKF2	21-Jun-24	12,440,000
36	517B06QT9GP20TBO	24-Jun-24	8,180,000
37	001386QT9GP20TA9	25-Jun-24	180,000
38	6180A45KQ119N9A6	20-Jun-24	5,085,000
39	9641F7NAPBARB99K	20-Jun-24	9,488,000
40	252631GCAHBTNQ90	25-Jun-24	4,206,660
41	811867NAPB923U51	13-Jun-24	27,345,000
42	253885229RLFQBQ43	25-Jun-24	163,725,000
43	A915B2CPQBT3VTBE	24-Jun-24	42,650,000

44	BB748397A6D42U91	13-Jun-24	16,720,000
45	BF52B5UFP7ROQ4S	25-Jun-24	92,250,000
46	BF2305229RLFBQ4E	25-Jun-24	226,437,000
47	BFEEC2CPQBSGT8KN	19-Jun-24	8,500,000
48	C04B645KQ11SPTBP	24-Jun-24	7,920,000
49	C87D26QT9GMLMUC7	13-Jun-24	1,980,000
50	D50F56QT9GOOFKFC	21-Jun-24	7,335,000
51	DA74B5229RJM4AH9	20-Jun-24	540,000
52	E752E0JUQMNO39FJ	20-Jun-24	1,975,000
53	E27201GCAHA4G9EO	20-Jun-24	1,325,000
54	F63AF0JUQMLURUAH	13-Jun-24	6,820,000
55	2B6950JUQMNO396D	20-Jun-24	5,320,000
56	C128F7NAPBE49QVK	2-Jul-24	6,300,000
57	70B415UFPN0JD4LV	8-Jul-24	13,570,000
58	AE6930JUQNI8V4P8	8-Jul-24	23,995,000
59	9B5CA7NAPC5C74QD	8-Jul-24	12,936,000
60	416E15229SE704T7	8-Jul-24	16,300,000
61	0E3EA2CPQCN1P5RC	8-Jul-24	12,162,000
62	BDBC80JUQNP4D0H8	31-Jul-24	117,341,741
63	A182E6QT9HPR80IO	31-Jul-24	5,885,000
64	AFAFE45KQ22M10KE	31-Jul-24	270,800
65	C2BCF2CPQCTT76LN	31-Jul-24	102,740,000
66	5B2A27NAPCC7L6RH	31-Jul-24	47,660,000
67	231B45UFPNSADGKK	1-Aug-24	8,687,500
68	6F2B25UFPNSADGL1	1-Aug-24	10,160,000
69	26F0D397A8556GM2	1-Aug-24	114,488,012
70	8FAE36QT9IEMQGMF	1-Aug-24	36,010,000
71	B50446QT9IEMQJN6	1-Aug-24	1,990,000
72	B8A576QT9IEMQJRT	1-Aug-24	1,270,000
73	2EE912CPQDIOPK3I	1-Aug-24	2,900,000
74	E5ED32CPQDIOPK6E	1-Aug-24	150,000
75	966F12CPQEIUU6BO	10-Sep-24	20,870
76	A00AF6QT9JESV6CT	10-Sep-24	5,000
77	03C7D6QT9JESV6S6	10-Sep-24	1,680,000
78	90CD46QT9JFG1OM3	13-Sep-24	100,000
79	9A7B71GCAK15JOO9	13-Sep-24	340,000
80	D5709397A96R1K72	15-Sep-24	22,720,000
81	BEE6D0JUQPFLQK73	15-Sep-24	31,465,000
82	C6BBE45KQ30TTBT3	16-Sep-24	4,500,000
83	672090JUQPFC9BTN	16-Sep-24	4,559,000
84	DCCD25UFPOTMNE8T	16-Sep-24	16,370,000
85	2F76F1GCAK1OME8U	16-Sep-24	22,285,000
86	4AD7C397A97E3VIP	16-Sep-24	6,415,000
87	15719397A97E3VIQ	16-Sep-24	3,180,000
88	E9B2E1GCAK2L9VOT	17-Sep-24	1,750,000
89	B1DE9397A97NL864	17-Sep-24	2,040,000

90	F6A775229UCGF86O	17-Sep-24	2,600,000
91	DFCF50JUQPFC9DPJ	18-Sep-24	800,000
92	9C4622CPQEK53DQ6	18-Sep-24	120,000
93	BE5B16QT9JHSBR33	19-Sep-24	7,257,500
94	303517NAPE48OR3S	19-Sep-24	2,900,000
95	213C95229UD3HR4H	19-Sep-24	11,306,000
96	143BF2CPQELUAR79	19-Sep-24	2,324,000
97	F9F87397A9ADGPFA	26-Sep-24	250,000
98	A57177NAPE6BHPGE	26-Sep-24	750,000
99	7E7E61GCAK5KMPHJ	26-Sep-24	650,000
100	9E88E7NAPE6L36I7	27-Sep-24	1,500,000
101	94E3A397A9AN26KF	27-Sep-24	1,500,000
102	F1E4645KQ3T3F7EI	27-Sep-24	1,755,000
103	C847E0JUQPJHR8TQ	27-Sep-24	18,218,000
104	D51705UFPP1S9BCK	27-Sep-24	16,480,000
105	1C27845KQ3T3FBCP	27-Sep-24	28,845,000
106	7C5EE6QT9JL5A26C	30-Sep-24	680,000
107	DEB610JUQPKEF28C	30-Sep-24	13,840,000
Jumlah			1,830,962,383

15. Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp509.135.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	2BF185UFPJFAVOV9	1-Apr-24	7,955,000
2	70CAB6QT9E1NCP4A	1-Apr-24	37,660,000
3	1E6382CPQ9S4LIJ4	4-Apr-24	255,000
4	2750B7NAP9AF3IKD	4-Apr-24	510,000
5	B43FB5229PJ9SIHO	4-Apr-24	510,000
6	744E66QT9FTU2OGE	31-May-24	370,000
7	A72365UFPJCL36NI	21-Mar-24	5,320,000
8	1FC231GCAEGN26KN	20-Mar-24	8,755,000
9	2D6135UFPIG1ETS7	24-Feb-24	16,575,000
10	82BCF7NAP7KQ8TS0	24-Feb-24	33,150,000
11	2F0B90JUQMOB5TBR	24-Jun-24	68,880,000
12	8CDBA397A6FGCTAC	25-Jun-24	185,000
13	53AD35229RJM49AJ	20-Jun-24	19,755,000
14	54D856QT9GOEUAJM	20-Jun-24	11,730,000
15	645C65229RHSSU5T	13-Jun-24	3,825,000
16	8434A5UFPM62H8MN	19-Jun-24	15,045,000
17	579466QT9GOEU8SS	19-Jun-24	82,875,000
18	BBA3F7NAPBBEDTA5	25-Jun-24	69,105,000
19	E3ADB5UFPM7I7I2A	24-Jun-24	62,220,000
20	F817B5UFPM3VOLNA	13-Jun-24	2,400,000
21	B9D316QT9HPR86NI	31-Jul-24	85,000
22	B35BD0JUQODVVJQI	1-Aug-24	46,820,000
23	098902CPQDIOPK1K	1-Aug-24	185,000
24	69ADB2CPQEIUU68E	10-Sep-24	185,000
25	41B8C45KQ3NNO6S2	10-Sep-24	500,000
26	0FD5E5229UA456S4	10-Sep-24	500,000
27	D04ED0JUQPFC9DQK	16-Sep-24	2,500,000
28	407686QT9JGCLK6U	15-Sep-24	5,200,000
29	34AA22CPQELUAQIN	19-Sep-24	1,870,000
30	C64667NAPE48OQT6	19-Sep-24	1,925,000
31	2E17E2CPQEOAL67Q	27-Sep-24	185,000
32	6B06A0JUQPJHR6EM	27-Sep-24	500,000
33	30A3F397A9AN26LS	27-Sep-24	500,000
34	F5B4D2CPQEOAL7B8	27-Sep-24	500,000
35	5084845KQ3T3F7FI	27-Sep-24	500,000
Jumlah			509,035,000

16. Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp1.004.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pengembalian Belanja Paket Meeting Luar Kota

No	NTPN	Tanggal	Nominal
1	B86370JUQMP7PH3J	24-Jun-24	421,654
2	8F143397A7CDJ1FL	19-Jul-24	410,825
3	E999345KQ5N7CNSP	22-Nov-24	4,000
4	B5FD11GCAM025NSS	22-Nov-24	2,500
5	6456745KQ5N7CNTF	22-Nov-24	2,500
6	B82291GCAM025NT5	22-Nov-24	163,141
Jumlah			1,004,620

Adapun bukti setor/Simponi pengembalian belanja tahun anggaran 2024 tersaji pada **lampiran II**.

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp Rp24.403.406.184,00 atau sebesar 90 persen dari anggaran sebesar Rp27.213.051.000,00. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 31. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

Uraian	2024		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,504,443,000	2,920,854,081	83%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	10,866,099,000	10,840,240,261	100%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	5,332,232,000	4,094,706,324	77%
Belanja Lembur	408,969,000	234,092,000	57%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	7,101,308,000	6,313,515,449	89%
Jumlah Belanja Kotor	27,213,051,000	24,403,408,115	90%
Pengembalian Belanja	-	1,931	100%
Jumlah Belanja	27,213,051,000	24,403,406,184	90%

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp24.403.406.184,00 dan Rp15.809.543.327,00 atau mengalami kenaikan sebesar 54 persen dibandingkan per 31 Desember 2023, Kenaikan disebabkan oleh bertambahnya jumlah pegawai yang mengakibatkan pembayaran gaji PNS dan PPPK, tunjangan struktural dan fungsional, uang makan, dan uang lembur meningkat dibandingkan bulan Desember 2024.

Berikut perbandingan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan TA 2023

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,920,854,081	2,743,515,141	6%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	10,840,240,261	10,479,603,700	3%
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	4,094,706,324	156,817,004	100%
Belanja Lembur	234,092,000	170,519,000	37%
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	6,313,515,449	2,261,789,250	179%
Jumlah Belanja Kotor	24,403,408,115	15,812,244,095	54%
Pengembalian Belanja	1,931	2,700,768	-100%
Jumlah Belanja	24,403,406,184	15,809,543,327	54%

Belanja pegawai sebesar Rp24.403.406.184,00 merupakan realisasi belanja netto yang berasal dari realisasi belanja pegawai bruto sebesar Rp24.403.408.115,00 setelah dikurang dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.931,00. Pengembalian belanja pegawai dirincikan sebagai berikut:

1. Pengembalian atas pembayaran gaji ke 13 Pegawai/Prajurit TNI/Anggota Polri senilai Rp1.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Rincian pengembalian belanja pembulatan gaji PNS

No	Nomor dokumen	Tanggal	Nominal
1	240101303002134	30-Apr-24	722
2	240101303002135	30-Apr-24	573
3	240101303008131	18-Dec-24	636
Jumlah			1,931

Dokumen pengembalian terlampir pada **lampiran II**.

B.3 Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp314.959.802.403,00 atau 90 persen dari anggaran sebesar Rp349.230.390.000,00. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 34. Perbandingan Anggaran dan Belanja Barang TA 2024

Uraian	2024		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang Operasional	34,805,001,000	32,714,247,009	94%
Belanja Barang Non Operasional	126,846,134,000	119,051,439,891	94%
Belanja Barang Persediaan	67,710,000	66,423,804	98%
Belanja Jasa	30,075,165,000	26,799,636,137	89%
Belanja Pemeliharaan	2,780,215,000	2,158,638,077	78%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	154,656,165,000	137,169,433,787	89%
Jumlah Belanja Kotor	349,230,390,000	317,959,818,705	91%
Pengembalian Belanja	-	3,000,016,302	100%
Jumlah Belanja	349,230,390,000	314,959,802,403	90%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp314.959.802.403,00 dan Rp164.571.988.712.,00. Realisasi belanja barang 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 91 persen dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2023. Berikut perbandingan realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023:

Tabel 35. Rincian Belanja Barang TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun)%
Belanja Barang Operasional	32,714,247,009	16,503,807,762	98%
Belanja Barang Non Operasional	119,051,439,891	70,042,537,276	70%
Belanja Barang Persediaan	66,423,804	59,287,000	12%
Belanja Jasa	26,799,636,137	22,887,450,220	17%
Belanja Pemeliharaan	2,158,638,077	2,009,978,337	7%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	137,169,433,787	54,658,090,562	151%
Jumlah Belanja Kotor	317,959,818,705	166,161,151,157	91%
Pengembalian Belanja	3,000,016,302	1,589,162,445	89%
Jumlah Belanja	314,959,802,403	164,571,988,712	91%

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp314.959.802.403,00 merupakan realisasi belanja netto yang berasal dari belanja barang bruto sebesar Rp317.959.818.705,00 dikurang dengan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan sebesar Rp.3.000.016.302,00.

Rincian pengembalian belanja barang sebesar Rp.3.000.016.302,00 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 36. Rincian Pengembalian Belanja Barang per kabupaten/kota TA 2024

No	NTPN	Tanggal Setor	Nominal
Belanja Keperluan Perkantoran			
1	17D7B45KQ06OROK	30-May-24	352,150
2	00B1D397A6ETA8R1	19-Jun-24	1,000,000
3	402895UFPM6LJTBL	24-Jun-24	750,000
4	B156F0JUQMJS2QPB	10-Jun-24	113,197
5	B62601GCAH8B8U8E	13-Jun-24	729,988
6	BE5C12CPQBT3VTAD	25-Jun-24	450,000
7	C6BFF45KQ132UQ5N	25-Jun-24	72,000
8	E419E5229RJVLKED	21-Jun-24	177,000
9	BAB932CPQCN1P4OI	6-Jul-24	2,252,300
10	9D5965229SL2E6SB	1-Aug-24	3,320,189
11	7D7E71GCAJ0CCJF1	1-Aug-24	2,777,750
12	EF6820JUQPEP6PB5	11-Sep-24	1,425,000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			
1	E6F641GCAIBGQ6QR/1	15-Aug-24	1,200,000
Belanja Barang Operasional Lainnya			
1	0AC8B0JUQSE5HH7M	31-Dec-2024	205,200
Belanja Bahan			
1	546CF6QT9E1NCP01	1-Apr-24	2,010,750
2	0FB522CPQ95PBP18	1-Apr-24	2,448,000

3	A5BDC1GCAF9O8JAB	4-Apr-24	38,205
4	B218B5229OSUIP3A	1-Apr-24	60,000
5	C1E365229OSUIOQ5	1-Apr-24	455,000
6	929FB7NAPAGAFOHC	31-May-24	1,250,000
7	1EE6E7NAPBCKIQ6Q	25-Jun-24	2,251,500
8	2E9615UFPM62HAIK	20-Jun-24	689,000
9	04B955UFPM26GQO6	10-Jun-24	100,000
10	4BA687NAPBARB9D8	20-Jun-24	255,000
11	4E6B65229RJVLKET	21-Jun-24	1,590,000
12	4F6AC1GCAHANITBJ	24-Jun-24	2,025,000
13	6C6345UFPM62H8TM	19-Jun-24	134,000
14	6CBEE2CPQBSGT94E	20-Jun-24	2,878,000
15	7A14B7NAPB923U9B	13-Jun-24	90,000
16	8AC4A1GCAH68FQOT	10-Jun-24	1,050,000
17	8DBEA45KQ132UQ6F	25-Jun-24	7,800,000
18	8DE0945KQ119N8L9	19-Jun-24	35,000
19	8F8D32CPQBSQEKDL	21-Jun-24	1,675,000
20	9E97C397A6ETA8PO	19-Jun-24	176,000
21	14D972CPQBSGTAJD	20-Jun-24	50,000
22	42A5C6QT9GQ85Q68	25-Jun-24	4,560,000
23	49DE91GCAHA4G9G5	20-Jun-24	1,175,000
24	57C5A6QT9GOOFKE9	21-Jun-24	2,703,000
25	68E8D397A6ETA95E	20-Jun-24	1,310,000
26	80CFE45KQ119N99E	20-Jun-24	1,175,000
27	0350D1GCAHANITBV	24-Jun-24	1,420,000
28	5964B7NAPB923UAV	13-Jun-24	1,240,000
29	8388C7NAPBARBAFT	20-Jun-24	795,000
30	A232A5229RJM49F3	20-Jun-24	1,970,000
31	AA7455229RJM499U	20-Jun-24	2,130,000
32	ADC4B0JUQMLURU6G	13-Jun-24	2,744,000
33	AEDAD7NAPBBEDTBN	24-Jun-24	90,000
34	AF4F445KQOVGFU4F	13-Jun-24	4,664,000
35	C453E5229RFQ3QPH	10-Jun-24	1,275,000
36	CB89B0JUQMOB5TAF	25-Jun-24	710,000
37	CEDF82CPQBSGT98G	20-Jun-24	10,050,000
38	DD9D22CPQBT3VTA7	25-Jun-24	300,000
39	E1FB76QT9GOOFKFI	21-Jun-24	710,000
40	E7AA65229RHSSUBO	13-Jun-24	355,000
41	E38515229RJM48K9	19-Jun-24	2,750,000
42	FDADB45KQ0VGFU8P	13-Jun-24	4,313,000
43	59A420JUQMR11QVE	2-Jul-24	1,750,000
44	976BE397A79E64K6	8-Jul-24	670,600
45	89B015UFPN0JD4NQ	8-Jul-24	940,400
46	F5BAD7NAPC5C74PR	8-Jul-24	795,000
47	818B32CPQCN1P4S7	8-Jul-24	100
48	955307NAPCC7L6MR	31-Jul-24	5,569,500

49	3BB70397A7G9K6PT	31-Jul-24	9,237,460
50	5A42C6QT9HPR86RP	31-Jul-24	25,892,360
51	E889B0JUQODVVGKS	1-Aug-24	752,500
52	9BDBB5UFPNADGLA	1-Aug-24	1,975,300
53	FAF5445KQ2NHJGLP	1-Aug-24	20,372,400
54	452E47NAPD137JGV	1-Aug-24	850,000
55	80FC97NAPD137JP6	1-Aug-24	252,000
56	EDB8B0JUQODVVJST	1-Aug-24	7,342,500
57	49D9A397A8556K55	1-Aug-24	1,815,000
58	6CCB06QT9IEMQK75	1-Aug-24	850,000
59	5780645KQ2NHJK82	1-Aug-24	650,000
60	BEE171GCAK1OMD6R	16-Sep-24	30,850,500
61	664DB5229UBAADQQ	16-Sep-24	2,915,000
62	8FABFOJUQPFC9DQV	16-Sep-24	2,337,500
63	283995229UBAADS1	18-Sep-24	1
64	961C12CPQEKEKK6L	15-Sep-24	4,131,000
65	1C91D6QT9JGCLK71	15-Sep-24	24,239,000
66	5CB6A5229UCGF857	17-Sep-24	255,000
67	6C7E645KQ3QN4QB3	19-Sep-24	885,000
68	AABA41GCAK3HTQLD	19-Sep-24	1,347,000
69	6596B1GCAK3HTQSI	19-Sep-24	5,425,000
70	57A54397A98ANQVU	19-Sep-24	3,925,200
71	10AFF0JUQPJHR6NP	27-Sep-24	300,000
72	0F6865UFPP1S97DN	27-Sep-24	300,000
73	B0CB72CPQEOAL7HR	27-Sep-24	300,000
74	A9A62397A9AN27JD	27-Sep-24	345,000
75	01E6A0JUQPJHR8T6	27-Sep-24	1,871,875
76	B830FOJUQPJHRBBT	27-Sep-24	23,631,000
77	6AC4C2CPQEP791LL	30-Sep-24	953,500
78	0EB410JUQPKEF21L	30-Sep-24	5,845,541
Belanja Honor Output Kegiatan			
1	31C4C397A7BQGEEC	17-Jul-24	3,300,000
2	74A646QT9HPR86R2	31-Jul-24	106,655,894
3	5EDF745KQ2VJ6KAV	29-Aug-24	1,100,000
4	44D9A0JUQPE646S0	10-Sep-24	300,000
5	6AE260JUQPFLQK6R	15-Sep-24	3,600,000
6	8EE7D1GCAK1OMDQA	16-Sep-24	150,000
7	A3F3E45KQ3PGVPUN	16-Sep-24	1,200,000
8	04E88397A98ANQHD	19-Sep-24	300,000
9	68AAC45KQ3QN4R26	19-Sep-24	1,000,000
10	CC6CA5UFPP1S9BB5	27-Sep-24	2,642,500
11	168E945KQ3PQGV0G/1	30-Sep-24	600,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
1	1E0957NAPBARBAHN	20-Jun-24	120,000
2	408B1397A6ETAHHS	20-Jun-24	100,000
3	C6E4FOJUQMNO3AIA	20-Jun-24	100,000

4	B7DC32CPQDIOPGM8	1-Aug-24	22,274,301
5	1FDE71GCAK3HTR5F	19-Sep-24	100,000
Belanja Langganan Listrik			
1	81B690JUQLT77OIC	30-May-24	558,014
2	3B8637NAPBCKIQ64	25-May-24	412,635
3	67EF75229RHJBLNB	13-Jun-24	23,793
4	69C3A5UFPM62H8QN	19-Jun-24	3,000
5	69CB90JUQMNO3AHH	20-Jun-24	1,000,000
6	569DE45KQ119N9DJ	20-Jun-24	298,500
7	48769397A6F6RKE0	21-Jun-24	621,000
8	BD5F02CPQBT3VTA1	25-Jun-24	950,000
9	BFB9C5UFPM62H95Q	20-Jun-24	760,700
10	CDE9D6QT9GMLMU7O	13-Jun-24	203,250
11	CE1CB0JUQMNO394V	20-Jun-24	679,883
12	8365C7NAPC5C74ML	8-Jul-24	745,500
13	BFB76QT9HPR86O6	31-Jul-24	810,000
14	AE632397A7G9K6S6	31-Jul-24	2,463,500
15	59C417NAPD137JJI	1-Aug-24	411,000
Belanja Langganan Air			
1	51DC8397A5KCEOJ	30-May-24	240,000
2	30C8F5UFPM499U86	13-Jun-24	97,650
3	76BE745KQ11J8KE5	21-Jun-24	114,600
4	C6EB36QT9GQ85Q60	25-Jun-24	312,400
5	F8BC445KQ119N952	20-Jun-24	200,000
6	C8CC55229RFQ3QON	10-Jun-24	8,300
7	DB7157NAPCC7L6Q8/1	15-Aug-24	649,700
Belanja Sewa			
1	2ECA42CPQ95PBORE	1-Apr-24	6,000,000
2	2EB8445KQ119N8LS	19-Jun-24	2,300,000
3	7C6731GCAH8B8U4P	13-Jun-24	3,900,000
4	15E405229RJVLKDN	21-Jun-24	5,773,500
5	77E6A2CPQBSGT8PV	19-Jun-24	300,000
6	93CA15UFPM62H8JM	19-Jun-24	2,000,000
7	604D05229RHSSU67	13-Jun-24	2,000,000
8	4062A6QT9GOEU9CJ	20-Jun-24	1,000,000
9	8077E1GCAHA4G9FR	20-Jun-24	550,000
10	962225229RJM48RR	19-Jun-24	1,300,000
11	B6E6E5UFPM62H97D	20-Jun-24	1,500,000
12	E1983397A6ETA9EC	20-Jun-24	1,500,000
13	F4E4E6QT9GMLMU9K	13-Jun-24	2,100,000
14	F769F7NAPBARBAFM	20-Jun-24	880,000
15	FDB182CPQBU0JI2J	24-Jun-24	108,160,000
16	2FD481GCAHDDEQVI	2-Jul-24	2,500,000
17	84F442CPQCN1P4L4	8-Jul-24	3,840,000
18	C235E6QT9HIVQ4RF	8-Jul-24	1,750,000
19	D60DF7NAPCC7L6M4	31-Jul-24	3,400,000

20	79C3E5229SL2E6NO	31-Jul-24	6,320,000
21	30EA245KQ2NHJGLH	1-Aug-24	20,000,000
22	A06F05UFPNSADJLH	1-Aug-24	2,000,000
23	12E4C5229T9U0JU6	1-Aug-24	4,150,000
24	ABDFD7NAPE2FHDP5	16-Sep-24	1,100,000
25	3D077397A96R1K6P	15-Sep-24	8,200,000
26	386AF7NAPE32JPUO	16-Sep-24	725,000
27	22721397A98ANQEF	19-Sep-24	14,000
28	4BFB41GCAK5U87KL	27-Sep-24	500,000
29	429677NAPE6L38SE	27-Sep-24	1,460,000
30	59DF70JUQPKEF19Q	30-Sep-24	1,300,000
31	BF0165UFPP1S9BC1/1	30-Sep-24	2,200,000
Belanja Jasa Profesi			
1	D53687NAP8K3POTF	1-Apr-24	200,000
2	7E2BF5UFPM26GQNR	10-Jun-24	400,000
3	559051GCAHAE1KD9	21-Jun-24	600,000
4	982707NAPBARB93V	20-Jun-24	300,000
5	A54B47NAPBARB9E1	20-Jun-24	400,000
6	C0FFE1GCAHANITBH	24-Jun-24	600,000
7	C490B5229RHSSU5B	13-Jun-24	200,000
8	D31801GCAHANITA3	25-Jun-24	7,200,000
9	9723B7NAPCC7L6N4	31-Jul-24	200,000
10	C376C2CPQCTT76N8	31-Jul-24	3,250,000
Belanja Jasa Lainnya			
1	9D101397A6ETA93M	20-Jun-24	1,500,000
2	9E1FF5229RHSSU5H	13-Jun-24	750,000
3	BA6727NAPB6VAQNJ	10-Jun-24	1,500,000
4	D9C9A5229QP58OFD	31-May-24	1,500,000
5	5A7706QT9EUU3F8U	26-Apr-24	500,000
6	0EF7F7NAP8K3POUE	1-Apr-24	3,750,000
7	C6F3745KQ2NHJK03	1-Aug-24	1,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
1	44AA76QT9FPEVBK3	15-May-24	211,291
2	6406E45KQ1UQ01F6	19-Jul-24	100,000
3	3241145KQ1UQ01G1	19-Jul-24	100,000
4	8C3510JUQNL8C1HL	19-Jul-24	30,000
5	4122F1GCAJ0CCT5O	3-Aug-24	5,000
6	9360A1GCAJ0CCT5S	3-Aug-24	20,000
7	4851A5229TDQ1SN2	15-Aug-24	130,000
8	B09EC1GCAK6HAOG4/ 1	30-Sep-24	150,000
9	6CBCF2CPQFKU9NVA	25-Oct-24	1,922,522
10	387C46QT9LECJNS5	22-Nov-24	92,500
11	69B5145KQ5N7CNT9	22-Nov-24	75,900
12	253066QT9MESCL37	31-Dec-24	2,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
1	1C5AC0JUQKU78FCJ	26-Apr-24	1,200,000

2	4779F7NAP8K3POS9	1-Apr-24	2,405,000
3	71A432CPQ9S4LIME	4-Apr-24	4,160,000
4	58E2F397A4LCFFAS	26-Apr-24	6,100,000
5	E84EBOJUQK10HP1S	1-Apr-24	10,000
6	5BF7F397A4LCFFDS	26-Apr-24	500,000
7	657A30JUQKU78FJT	26-Apr-24	600,000
8	0B0A9397A5KCEODI	31-May-24	1,560,000
9	A39052CPQB201OLC	30-May-24	2,000,000
10	F9B512CPQATGUC9A	16-May-24	600,000
11	18B286QT9GOEU8M7	19-Jun-24	100,000
12	0A3982CPQBSGT96S	20-Jun-24	13,640,000
13	0B0411GCAHA4G8SA	19-Jun-24	72,000
14	0E2E95UFPM6C2KDS	21-Jun-24	17,550,000
15	1FDDE1GCAHANITBS	24-Jun-24	8,470,000
16	2C8B82CPQBSGT9H7	20-Jun-24	3,100,000
17	2F80E5229RHSSUBB	13-Jun-24	16,090,000
18	3EF190JUQMNO3AG6	20-Jun-24	1,000,000
19	5A28A6QT9GOOFKF6	21-Jun-24	8,560,000
20	6CEB6397A6ETA98S	20-Jun-24	5,512,000
21	08F302CPQBUA4Q4K	25-Jun-24	116,185,000
22	8E7BE1GCAHBTNQ4P	25-Jun-24	112,054,500
23	9FB5745KQ119N94O	20-Jun-24	8,436,000
24	18A7E2CPQBT3VTBT	24-Jun-24	5,770,000
25	20C7C5229RJVLKEO	21-Jun-24	49,893,500
26	25C257NAPB6VAQPR	10-Jun-24	1,500,000
27	43A406QT9GOEU9FC	20-Jun-24	1,700,000
28	51B8B0JUQMNO3AGF	20-Jun-24	720,000
29	60A805229RJM4AGP	20-Jun-24	810,000
30	75E095229RJM48Q6	19-Jun-24	740,000
31	79F1C5UFPM62HAGU	20-Jun-24	540,000
32	80D5B1GCAHAE1K6O	21-Jun-24	21,300
33	97BC7397A6D42UA9	13-Jun-24	16,280,000
34	226FB7NAPBBEDTBU	24-Jun-24	8,640,000
35	381D15229RJVLKF2	21-Jun-24	12,440,000
36	517B06QT9GP20TBO	24-Jun-24	8,180,000
37	001386QT9GP20TA9	25-Jun-24	180,000
38	6180A45KQ119N9A6	20-Jun-24	5,085,000
39	9641F7NAPBARB99K	20-Jun-24	9,488,000
40	252631GCAHBTNQ90	25-Jun-24	4,206,660
41	811867NAPB923U51	13-Jun-24	27,345,000
42	253885229RLFBQ43	25-Jun-24	163,725,000
43	A915B2CPQBT3VTBE	24-Jun-24	42,650,000
44	BB748397A6D42U91	13-Jun-24	16,720,000
45	BF52B5UFPM7ROQ4S	25-Jun-24	92,250,000
46	BF2305229RLFBQ4E	25-Jun-24	226,437,000
47	BFEEC2CPQBSGT8KN	19-Jun-24	8,500,000

48	C04B645KQ11SPTBP	24-Jun-24	7,920,000
49	C87D26QT9GMLMUC7	13-Jun-24	1,980,000
50	D50F56QT9GOOFKFC	21-Jun-24	7,335,000
51	DA74B5229RJM4AH9	20-Jun-24	540,000
52	E752E0JUQMNO39FJ	20-Jun-24	1,975,000
53	E27201GCAHA4G9EO	20-Jun-24	1,325,000
54	F63AF0JUQMLURUAH	13-Jun-24	6,820,000
55	2B6950JUQMNO396D	20-Jun-24	5,320,000
56	C128F7NAPBE49QVK	2-Jul-24	6,300,000
57	70B415UFPNOJD4LV	8-Jul-24	13,570,000
58	AE6930JUQNI8V4P8	8-Jul-24	23,995,000
59	9B5CA7NAPC5C74QD	8-Jul-24	12,936,000
60	416E15229SE704T7	8-Jul-24	16,300,000
61	0E3EA2CPQCN1P5RC	8-Jul-24	12,162,000
62	BDBC80JUQNP4D0H8	31-Jul-24	117,341,741
63	A182E6QT9HPR80IO	31-Jul-24	5,885,000
64	AFAFE45KQ22M10KE	31-Jul-24	270,800
65	C2BCF2CPQCTT76LN	31-Jul-24	102,740,000
66	5B2A27NAPCC7L6RH	31-Jul-24	47,660,000
67	231B45UFPNSADGKK	1-Aug-24	8,687,500
68	6F2B25UFPNSADGL1	1-Aug-24	10,160,000
69	26F0D397A8556GM2	1-Aug-24	114,488,012
70	8FAE36QT9IEMQGMF	1-Aug-24	36,010,000
71	B50446QT9IEMQJN6	1-Aug-24	1,990,000
72	B8A576QT9IEMQJRT	1-Aug-24	1,270,000
73	2EE912CPQDIOPK3I	1-Aug-24	2,900,000
74	E5ED32CPQDIOPK6E	1-Aug-24	150,000
75	966F12CPQEIUU6BO	10-Sep-24	20,870
76	A00AF6QT9JESV6CT	10-Sep-24	5,000
77	03C7D6QT9JESV6S6	10-Sep-24	1,680,000
78	90CD46QT9JFG1OM3	13-Sep-24	100,000
79	9A7B71GCAK15JOO9	13-Sep-24	340,000
80	D5709397A96R1K72	15-Sep-24	22,720,000
81	BEE6D0JUQPFLQK73	15-Sep-24	31,465,000
82	C6BBE45KQ3OTTBT3	16-Sep-24	4,500,000
83	672090JUQPFC9BTN	16-Sep-24	4,559,000
84	DCCD25UFPOTMNE8T	16-Sep-24	16,370,000
85	2F76F1GCAK1OME8U	16-Sep-24	22,285,000
86	4AD7C397A97E3VIP	16-Sep-24	6,415,000
87	15719397A97E3VIQ	16-Sep-24	3,180,000
88	E9B2E1GCAK2L9VOT	17-Sep-24	1,750,000
89	B1DE9397A97NL864	17-Sep-24	2,040,000
90	F6A775229UCGF86O	17-Sep-24	2,600,000
91	DFCF50JUQPFC9DPJ	18-Sep-24	800,000
92	9C4622CPQEK53DQ6	18-Sep-24	120,000
93	BE5B16QT9JHSBR33	19-Sep-24	7,257,500

94	303517NAPE48OR3S	19-Sep-24	2,900,000
95	213C95229UD3HR4H	19-Sep-24	11,306,000
96	143BF2CPQELUAR79	19-Sep-24	2,324,000
97	F9F87397A9ADGPFA	26-Sep-24	250,000
98	A57177NAPE6BHPGE	26-Sep-24	750,000
99	7E7E61GCAK5KMPHJ	26-Sep-24	650,000
100	9E88E7NAPE6L36I7	27-Sep-24	1,500,000
101	94E3A397A9AN26KF	27-Sep-24	1,500,000
102	F1E4645KQ3T3F7EI	27-Sep-24	1,755,000
103	C847E0JUQPJHR8TQ	27-Sep-24	18,218,000
104	D51705UFPP1S9BCK	27-Sep-24	16,480,000
105	1C27845KQ3T3FBCP	27-Sep-24	28,845,000
106	7C5EE6QT9JL5A26C	30-Sep-24	680,000
107	DEB610JUQPKEF28C	30-Sep-24	13,840,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
1	2BF185UFPJFAVOV9	1-Apr-24	7,955,000
2	70CAB6QT9E1NCP4A	1-Apr-24	37,660,000
3	1E6382CPQ9S4LIJ4	4-Apr-24	255,000
4	2750B7NAP9AF3IKD	4-Apr-24	510,000
5	B43FB5229PJ9SIHO	4-Apr-24	510,000
6	744E66QT9FTU2OGE	31-May-24	370,000
7	A72365UFPJCL36NI	21-Mar-24	5,320,000
8	1FC231GCAEGN26KN	20-Mar-24	8,755,000
9	2D6135UFPIG1ETS7	24-Feb-24	16,575,000
10	82BCF7NAP7KQ8TS0	24-Feb-24	33,150,000
11	2F0B90JUQMOB5TBR	24-Jun-24	68,880,000
12	8CDBA397A6FGCTAC	25-Jun-24	185,000
13	53AD35229RJM49AJ	20-Jun-24	19,755,000
14	54D856QT9GOEUAJM	20-Jun-24	11,730,000
15	645C65229RHSSU5T	13-Jun-24	3,825,000
16	8434A5UFPM62H8MN	19-Jun-24	15,045,000
17	579466QT9GOEU8SS	19-Jun-24	82,875,000
18	BBA3F7NAPBBEDTA5	25-Jun-24	69,105,000
19	E3ADB5UFPM7I7I2A	24-Jun-24	62,220,000
20	F817B5UFPM3VOLNA	13-Jun-24	2,400,000
21	B9D316QT9HPR86NI	31-Jul-24	85,000
22	B35BD0JUQODVVJQI	1-Aug-24	46,820,000
23	098902CPQDIOPK1K	1-Aug-24	185,000
24	69ADB2CPQEIUU68E	10-Sep-24	185,000
25	41B8C45KQ3NNO6S2	10-Sep-24	500,000
26	0FD5E5229UA456S4	10-Sep-24	500,000
27	D04ED0JUQPFC9DQK	16-Sep-24	2,500,000
28	407686QT9JGCLK6U	15-Sep-24	5,200,000
29	34AA22CPQELUAQIN	19-Sep-24	1,870,000
30	C64667NAPE48OQT6	19-Sep-24	1,925,000
31	2E17E2CPQEOAL67Q	27-Sep-24	185,000

32	6B06A0JUQPJHR6EM	27-Sep-24	500,000
33	30A3F397A9AN26LS	27-Sep-24	500,000
34	F5B4D2CPQEOAL7B8	27-Sep-24	500,000
35	5084845KQ3T3F7FI	27-Sep-24	500,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
1	B86370JUQMP7PH3J	24-Jun-24	421,654
2	8F143397A7CDJ1FL	19-Jul-24	410,825
3	E999345KQ5N7CNSP	22-Nov-24	4,000
4	B5FD11GCAM025NSS	22-Nov-24	2,500
5	6456745KQ5N7CNTF	22-Nov-24	2,500
6	B82291GCAM025NT5	22-Nov-24	163,141

Bukti setor pengembalian belanja barang tahun anggaran 2024 terlampir pada **lampiran II**.

Belanja Modal
Rp6.649.389.700,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.649.389.700,00 atau 92 persen dari anggaran sebesar Rp7.194.004.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja modal per 31 Desember 2024:

Tabel 37. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024

Uraian	2024		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,044,004,000	6,499,592,500	92%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150,000,000	149,797,200	100%
Jumlah Belanja Kotor	7,194,004,000	6,649,389,700	92%
Pengembalian Belanja	-	-	0%
Jumlah Belanja	7,194,004,000	6,649,389,700	92%

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp6.649.389.700,00 dan Rp2.100.237.064,00. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 217 persen dibandingkan realisasi belanja modal per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan kenaikan kebutuhan aset pada tahun 2024.

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,499,592,500	1,787,154,408	264%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149,797,200	313,082,656	0%
Jumlah Belanja Kotor	6,649,389,700	2,100,237,064	217%
Pengembalian Belanja	-	-	0%
Jumlah Belanja	6,649,389,700	2,100,237,064	217%

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp6.649.389.700,00 dan Rp2.100.237.064,00. Perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp6.649.389.700,00

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun)%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,649,389,700	2,100,237,064	217%
Jumlah Belanja Kotor	6,649,389,700	2,100,237,064	217%
Pengembalian Belanja	-	-	0%
Jumlah Belanja	6,649,389,700	2,100,237,064	217%

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp58.990.050.061,00

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp58.990.050.061,00 dan Rp67.439.128.199,00. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran. Kas lainnya dan setara kas sebesar Rp58.990.050.061,00 dirincikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Lain di Bendahara Pengeluaran	62,210,938.00	607,182,639.00
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	58,927,839,123.00	66,831,945,560.00
Total	58,990,050,061.00	67,439,128,199.00

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp62.210.938,00 dengan rincian sumber sebagai berikut:

Sumber Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024

Keterangan	31 Desember 2024
Utang Pajak BP yg belum disetor	7,175,995.00
Pembukuan ganda Bawaslu Kab Mentawai	14,129,811.00
Pembukuan ganda Bawaslu Kab Solok Selatan	40,905,132.00
Total	62,210,938.00

- a. Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sebesar Rp7.175.995,00 merupakan utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2024.

Uraian	Nilai
Kab Pesisir Selatan	90,000.00
Kota Solok	4,000.00
Kab Tanah Datar	5,453,700.00
Kab Pasaman	164,000.00
Kab 50 Kota	634,234.00
Kota Padang	20,000.00
Kota Bukittinggi	395,270.00
Provinsi Sumatera Barat	414,791.00
Total	7,175,995.00

- b. Pembukuan ganda Bawaslu Kab Mentawai sebesar Rp 14.129.811,00 merupakan pembukuan atas belanja hibah yang dibukukan lebih dari satu kali dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	NOMINAL	AKUN
1	Belanja Transportasi PATROLI Masa Tenang Bawaslu Mentawai Tanggal 24 s/d 26 Desember 2024	9,543,500	5245.BIC.322.0A.524113
2	Belanja Transportasi Penertiban APK Bawaslu Mentawai	1,950,000	5245.BIC.322.0A.524113
3	Belanja Transportasi Apel Siaga dan Masa Tenang Tanggal 24 November 2024	2,550,000	5245.BIC.322.0A.524113
4	Perjalanan Dinas An. Apesta Penunjang DS Ke Jakarta Tanggal 30 Oktober s/d 03 November 2024 Dalam Rangka Koordinasi Penguatan Organisasi Bawaslu Dalam Pengawasan dan Mitigasi Pada Tahapan Logistik Pemiliha	86,311	5245.BIC.322.0A.524111
	JUMLAH	14,129,811	

- c. Pembukuan ganda Bawaslu Kab Solok Selatan sebesar Rp40.905.132,00 merupakan pembukuan atas belanja hibah yang dibukukan lebih dari satu kali dengan rincian:

No.	Uraian	Nominal	Akun
1	Pengembalian Sewa Kantor panwascom Sungai Pagu tahun 2024	12.600.000	5245.BIC.003.306.522141
2	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas Ke Batam pada tanggal 23 Juli 2024	8.080.000	5245.BIC.003.322.524111
3	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas an. Rabiatul Gusti	200.000	5245.BIC.003.322.524111
4	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas an. Yusmardi Tanggal 31 September 2024	300.000	5245.BIC.003.322.524113
5	Pengembalian Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas an. Susi Kartika Dkk ke Batam tgl 29 juni 2024 Raker Strategis PPS Wil Sumbar	242.697	5245.BIC.003.322.524111
6	Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas an. Citra Ramdhan tanggal 11-13 September 2024 ke jogyakarta	1.000	5245.BIC.003.322.524111
7	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas an. Zul Nasri tanggal 06 sd 09 November 2024 Dalam rangka menghadiri Sidang tindak pelanggaran pemilihan 2024 oleh Gakkumdu di pengadilan negeri Koto Baru Kabupaten Solok	730.000	5245.BIC.003.322.524111
8	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas an. Rino Syah Putra Ke JKT tgl 26 des 2024 sd 01 Jan 2025 Rapat Lanjutan di MK	7.101.340	5245.BIC.003.322.524111
9	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas an Nila Puspita tgl 06 sd 09 sept 2024 ke Jakarta workshop tindak pidana Pemilihan 2024 gelombang 4	6.000.000	5245.BIC.003.322.524111
10	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas an Andri Wahyudi ke Bogor tgl 08 sd 12 des 2024 Bimtek sistem Kearsipan srikandi	2.600.000	5245.BIC.003.322.524111
11	Pengembalian Uang Muka Perjalanan Dinas an Junida Mardani ke Bogor tgl 08 sd 12 des 2024 Bimtek sistem Kearsipan srikandi	2.400.000	5245.BIC.003.322.524111
12	Pengembalian Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas an Muhammad taufik tgl 06 sd 09 sept 2024 ke Jakarta workshop tindak pidana Pemilihan 2024 gelombang 4	110.095	5245.BIC.003.322.524111
13	Pengembalian Pembayaran Transpor dan Uang Harian Netralitas ASN Perangkat nagari Se Kabupaten Solok Selatan Pada Kegiatan Tanggal 21 November 2024	540.000	5245.BIC.003.314.524114
	Jumlah	40.905.132	

2. Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari hibah per 31 Desember 2024 sebesar

Rp58.927.839.123,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan SP2HL	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal (Rp)
Pengesahan Pendapatan TA 2023			66,831,945,560.00
Kota Padang	230100000000081	31-Dec-23	4,310,000,000.00
Kota Solok	230100000000080	31-Dec-23	1,600,000,000.00
Kab Padang Pariaman	230100000000079	31-Dec-23	5,200,000,000.00
Kota Payakumbuh	230100000000078	31-Dec-23	2,080,000,000.00
Kota Padang panjang	230100000000077	31-Dec-23	1,482,175,000.00
Kab 50 Kota	230100000000076	31-Dec-23	4,799,965,000.00
Kab Solok	230100000000075	31-Dec-23	3,192,725,960.00
Kota Pariaman	230100000000074	31-Dec-23	2,193,187,600.00
Kab Pasaman Barat	230100000000073	31-Dec-23	4,280,000,000.00
Provinsi Sumatera Barat	230100000000072	31-Dec-23	12,029,058,000.00
Kab Pasaman	230100000000071	31-Dec-23	5,141,757,600.00
Kota Sawahlunto	230100000000070	31-Dec-23	1,220,000,000.00
Kab Agam	230100000000069	31-Dec-23	500,000,000.00
Kab Kep Mentawai	230100000000068	31-Dec-23	1,200,000,000.00
Kab Dharmasraya	230100000000067	31-Dec-23	4,400,000,000.00
Kab Sijunjung	230100000000066	31-Dec-23	4,200,000,000.00
Kab Solok Selatan	230100000000065	31-Dec-23	2,400,000,000.00
Kab Pesisir Selatan	230100000000064	31-Dec-23	200,000,000.00
Kota Bukittinggi	230100000000063	31-Dec-23	1,400,000,000.00
Kab Tanah Datar	230100000000062	31-Dec-23	5,003,076,400.00
Pengesahan Pendapatan TA 2024			137,320,621,440.00
Kab Padang Pariaman	240100000000100	23-Oct-24	7,800,000,000.00
Kab 50 Kota	240100000000099	23-Oct-24	7,200,000,000.00
Kab Pasaman Barat	240100000000098	23-Oct-24	6,420,000,000.00
Provinsi Sumatera Barat	240100000000097	23-Oct-24	26,221,582,000.00
Kab Pasaman	240100000000096	23-Oct-24	7,712,636,400.00

Kota Sawahlunto	240100000000095	23-Oct-24	1,830,000,000.00
Kab Agam	240100000000094	23-Oct-24	7,140,000,000.00
Kab Kep Mentawai	240100000000093	23-Oct-24	4,808,244,000.00
Kab Dharmasraya	240100000000092	23-Oct-24	6,600,000,000.00
Kab Pesisir Selatan	240100000000091	23-Oct-24	7,140,483,000.00
Kab Tanah Datar	240100000000090	23-Oct-24	7,504,614,600.00
Kota Padang	240100000000047	28-Jun-24	6,465,000,000.00
Kota Solok	240100000000046	28-Jun-24	2,400,000,000.00
Kota Payakumbuh	240100000000045	28-Jun-24	3,120,000,000.00
Kota Padang Panjang	240100000000044	28-Jun-24	2,223,275,000.00
Kab Solok	240100000000043	28-Jun-24	7,557,274,040.00
Kota Pariaman	240100000000042	28-Jun-24	3,289,781,400.00
Kab Agam	240100000000041	28-Jun-24	4,260,000,000.00
Kab Sijunjung	240100000000040	28-Jun-24	6,300,000,000.00
kab Solok	240100000000039	28-Jun-24	3,600,000,000.00
Kab Pesisir Selatan	240100000000038	28-Jun-24	4,560,322,000.00
Kota Bukittinggi	240100000000037	28-Jun-24	3,167,409,000.00
Pengesahan Belanja			(145,224,727,877.00)
Kota Solok	240100600440001	31-Dec-24	(3,092,690,188.00)
Kota padang panjang	240100600430002	31-Dec-24	(1,529,892,851.00)
Kota Bukittinggi	240100600360001	31-Dec-24	(1,813,100,196.00)
Kab Dharmasraya	240100600370001	31-Dec-24	(8,043,179,157.00)
Kab Agam	240100600390002	31-Dec-24	(5,325,728,890.00)
Kab Pasaman	240100600400002	31-Dec-24	(4,920,494,632.00)
Kota Solok	240100600650025	31-Dec-24	(15,490,000.00)
Kab Pesisir Selatan	240100600650022	31-Dec-24	(878,221,500.00)
Kab Agam	240100600650019	31-Dec-24	(705,655,050.00)
Kab Solok Selatan	240100600650021	31-Dec-24	(314,637,000.00)
Kab Dharmasraya	240100600650023	31-Dec-24	(242,765,000.00)

Kab 50 Kota	240100600650026	31-Dec-24	(509,272,000.00)
Provinsi Sumatera Barat	240100600650020	31-Dec-24	(4,573,981,139.00)
Kab Padang Pariaman	240100600650024	31-Dec-24	(643,020,000.00)
Kab Tanah Datar	240100600650027	31-Dec-24	(1,655,000.00)
Kab 50 Kota	240100600420002	31-Dec-24	(4,248,964,865.00)
Kab Solok Selatan	240100600620001	31-Dec-24	(1,166,720,196.00)
Kab Solok Selatan	240100600620002	31-Dec-24	(673,302,845.00)
Kab Solok Selatan	240100600620003	31-Dec-24	(2,824,268,730.00)
Kab Solok Selatan	240100600620004	31-Dec-24	(3,184,000.00)
Kab Solok	240100600670001	31-Dec-24	(4,678,904,622.00)
Kab Kep Mentawai	240100600380001	31-Dec-24	(2,668,254,120.00)
Kab Tanah Datar	240100600600002	31-Dec-24	(5,342,381,673.00)
Kab Sijunjung	240100600630001	31-Dec-24	(3,981,303,157.00)
Kab Pesisir Selatan	240100600610001	31-Dec-24	(5,976,147,189.00)
Kab Padang Pariaman	240100600450001	31-Dec-24	(5,650,579,426.00)
Kota Padang	240100600460002	31-Dec-24	(5,355,002,377.00)
Kota Pariaman	240100600660001	31-Dec-24	(1,941,601,622.00)
Kota Sawahlunto	240100600640001	31-Dec-24	(1,273,803,800.00)
Kab Pasaman Barat	240100600410002	31-Dec-24	(3,760,420,082.00)
Kota Payakumbuh	240100600680001	31-Dec-24	(1,423,151,790.00)
Kota Bukittinggi	240100600650011	31-Dec-24	(131,155,000.00)
Kab Solok	240100600650016	31-Dec-24	(488,870,000.00)
Kota Padang panjang	240100600650014	31-Dec-24	(56,450,000.00)
Kota Payakumbuh	240100600650012	31-Dec-24	(184,576,000.00)
Kab Pasaman Barat	240100600650009	31-Dec-24	(424,244,000.00)
Kab Tan Datar	240100600650017	31-Dec-24	(648,122,500.00)
Kab Sijunjung	240100600650008	31-Dec-24	(253,758,000.00)
Kota Pariaman	240100600650013	31-Dec-24	(111,180,000.00)
Kota Sawahlunto	240100600650015	31-Dec-24	(112,880,000.00)

Kota Padang	240100600650007	31-Dec-24	(730,552,500.00)
Kab Pasaman	240100600650010	31-Dec-24	(465,777,800.00)
Kab Kep Mentawai	240100600650018	31-Dec-24	(289,740,000.00)
Kab Dharmasraya	240100600650001	31-Dec-24	(490,117,500.00)
Kab Sijunjung	240100600650006	31-Dec-24	(388,560,500.00)
Kab Solok Selatan	240100600650004	31-Dec-24	(195,031,000.00)
Kota Solok	240100600650003	31-Dec-24	(179,030,000.00)
Kab Pasaman	240100600650002	31-Dec-24	(351,155,900.00)
Kota Bukittinggi	240100600650005	31-Dec-24	(174,381,000.00)
Kab 50 Kota	230100600540012	31-Dec-24	(465,900,800.00)
Kab Agam	230100600540007	31-Dec-24	(457,116,000.00)
Kab Solok	230100600540011	31-Dec-24	(588,329,000.00)
Kota Payakumbuh	230100600540008	31-Dec-24	(199,585,500.00)
Provinsi Sumatera Barat	230100600540014	31-Dec-24	(2,389,117,463.00)
Kab Pasaman Barat	230100600540010	31-Dec-24	(495,719,000.00)
Kota padang panjang	230100600540009	31-Dec-24	(181,779,900.00)
Kab Tanah Datar	230100600540013	31-Dec-24	(210,355,310.00)
Kab Tanah Datar	240100600600001	30-Dec-24	(3,237,227,618.00)
Kab Agam	240100600390001	30-Dec-24	(4,168,817,936.00)
Kota Padang Panjang	240100600430001	30-Dec-24	(1,280,020,515.00)
Kab Pasaman	240100600400001	30-Dec-24	(3,912,863,662.00)
Kab Padang Pariaman	230100600430001	27-Dec-24	(5,121,736,069.00)
Kota Padang	240100600460001	27-Dec-24	(2,891,353,672.00)
Kota Padang	230100600540005	27-Dec-24	(461,026,200.00)
Kab Kep Mentawai	230100600540004	27-Dec-24	(462,115,000.00)
Kota Sawahlunto	230100600540001	27-Dec-24	(130,585,000.00)
Kab Pesisir Selatan	230100600540002	27-Dec-24	(330,630,000.00)
Kota Pariaman	230100600540006	27-Dec-24	(288,383,000.00)
Kab Padang Pariaman	230100600540003	27-Dec-24	(762,775,000.00)

Kota Sawahlunto	230100600530001	27-Dec-24	(1,376,772,377.00)
Kota Bukittinggi	230100600370001	27-Dec-24	(1,652,529,742.00)
Kab 50 Kota	240100600420001	27-Dec-24	(4,001,697,676.00)
Kab Kep Mentawai	230100600440001	23-Dec-24	(3,133,843,488.00)
Kota Pariaman	230100600520001	23-Dec-24	(2,406,710,257.00)
Kab Solok	230100600550001	23-Dec-24	(3,644,061,845.00)
Kab Sijunjung	230100600470001	23-Dec-24	(2,882,793,907.00)
Kab Pesisir Selatan	230100600490001	23-Dec-24	(3,324,337,683.00)
Kota Payakumbuh	230100600560001	19-Dec-24	(2,030,812,029.00)
Kab Pasaman Barat	240100600410001	19-Dec-24	(3,482,377,431.00)
Total			58,927,839,123.00

Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid)
Rp637.683.333,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Nilai Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp637.683.333,00 dan Rp354.426.667,00. Belanja dibayar dimuka merupakan biaya yang menjadi kewajiban untuk dibayar dalam periode tertentu tetapi sudah dibayar dan manfaat atas biaya tersebut tidak diterima pada saat itu juga. Rincian belanja dibayar dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Tabel 40. Perbandingan Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 30 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	637,683,333	354,426,667
Jumlah	637,683,333	354,426,667

Belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat merupakan belanja sewa rumah dinas bawaslu provinsi sumatera barat dan sewa kendaraan operasional bawaslu kabupaten/kota se-sumatera barat dengan rincian:

NO	PROVINSI/ KABUPAT EN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	Periode Kontrak (Bulan)	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	SEWA DIBAYAR DIMUKA (Rp)
1	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Kendaraan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota	005/Bawaslu- SB/SP/JS/02/2024	12	4,006,800,00 0	333,900,000
2	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Kendaraan Operasional Bawaslu Kabupaten/Kota	006/Bawaslu- SB/SP/JS/03/2024	12	1,345,200,00 0	224,200,000
3	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Rumah Dinas Jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	005/Bawaslu- SB/SPK/JS/06/2024 tgl 28 juni 2024	12	34,500,000	17,250,000

4	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Rumah Dinas Jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	006/Bawaslu-SB/SPK/JS/06/2024 tgl 28 juni 2024	12	35,000,000	17,500,000
5	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Rumah Dinas Jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	006.A/Bawaslu-SB/SPK/JS/06/2024 tgl 28 juni 2024	12	33,000,000	16,500,000
6	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Rumah Dinas Jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	008/Bawaslu-SB/SPK/JS/07/2024 tgl 26 juli 2024	12	20,000,000	10,000,000
7	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	Sewa Rumah Dinas Jabatan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat	017/Bawaslu-SB/SPK/JS/09/2024 tgl 23 september 2024	12	27,500,000	18,333,333
Total						637,683,333.33

Persediaan

Rp0,00

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan nilai persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbandingan saldo persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan	-	-
Jumlah	-	-

Mutasi nilai persediaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 42. Mutasi nilai persediaan

Saldo nilai persediaan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	66,423,804
Perolehan Lainnya	2,808,502,000
Jumlah mutasi tambah	2,874,925,804
Mutasi kurang:	
Habis Pakai	2,874,925,804
Jumlah mutasi kurang	2,874,925,804
Saldo persediaan per 31 Desember 2024	-

Penjelasan mutasi:

Mutasi tambah:

1. Mutasi tambah sebesar Rp66.423.804,00 merupakan pembelian barang persediaan

barang konsumsi yang diperoleh dari akun 521811 bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 terlampir pada **lampiran III**.

2. Perolehan lainnya sebesar Rp2.808.502.000,00 merupakan perolehan atas atribut identitas PTPS yang belum didistribusikan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir pada **lampiran IV**.

Mutasi kurang:

1. Mutasi kurang sebesar Rp2.874.925.804,00 merupakan pemakaian barang persediaan barang konsumsi yang diperoleh dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 terlampir pada **lampiran V**.

Tanah

Rp1.339.439.000,00

C.4 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp1.339.439.000,00 dan Rp0,00. Perbandingan saldo tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 43. Perbandingan Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Tanah	1,339,439,000	-
Jumlah	1,339,439,000	-

Mutasi nilai Tanah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 44. Mutasi nilai Tanah

Saldo nilai perolehan per 1 januari 2024	-
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	1,339,439,000
Pembelian	
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	1,339,439,000
Mutasi Kurang	
Hibah Keluar	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	1,339,439,000

Penjelasan mutasi:

Mutasi tambah:

1. Transfer masuk Tanah sebesar Rp1.339.439.000,00 merupakan transfer masuk aset tanah yang sebelumnya tercatat di Sekretariat Jenderal Bawaslu RI dan telah

ditransfer masuk ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai Berita Acara Transfer Barang Milik Negara nomor 43/PL.09/KB/08/2023 tanggal 24 Agustus 2023. Berita Acara Transfer Barang Milik Negara terlampir pada **lampiran VI**.

Peralatan dan Mesin
Rp20.531.848.941,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing sebesar Rp20.531.848.941,00 dan Rp13.807.530.441,00. Perbandingan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 45. Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Peralatan dan mesin	20,531,848,941	13,807,530,441
Jumlah	20,531,848,941	13,807,530,441

Mutasi nilai peralatan dan mesin dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 46. Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2024	13,807,530,441
Mutasi Tambah	
Pembelian	6,499,592,500
Transfer Masuk	133,001,000
Reklasifikasi Masuk	216,600,000
Perolehan Lainnya (intrakomptabel dan ekstrakomptabel)	78,505,000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	27,900,000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif	-
Jumlah Mutasi Tambah	6,955,598,500
Mutasi Kurang	
Hibah Keluar	
Transfer Keluar	-
Penghentian Aset Dari Penggunaan	
Perolehan Lainnya (ekstrakomptabel)	2,980,000
Pencatatan nilai berkurang	11,700,000
Reklasifikasi Keluar	216,600,000
Jumlah Mutasi Kurang	231,280,000
Saldo per 31 Desember 2024	20,531,848,941
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13,224,022,439)
Nilai buku per 31 Desember 2024	7,307,826,502

Penjelasan mutasi:

Mutasi tambah

1. Pembelian sebesar Rp6.499.592.500,00 merupakan pembelian peralatan dan mesin

yang dikelompokkan sebagai aset intrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Intrakomptabel per 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	18	73,500,000
3.05.01.05.002	Meja Kerja Kayu	2	7,000,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	2	3,300,000
3.05.02.01.003	Sofa	2	26,200,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	44	341,737,500
3.10.01.02.002	Laptop	153	2,232,930,000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	272,600,000
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	21	293,325,000
3.02.01.01.003	Station Wagon	6	3,249,000,000
TOTAL		296	6,499,592,500

Rincian pembelian peralatan dan mesin terlampir pada lampiran VII.

2. Transfer masuk sebesar Rp133.001.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.06.01.118	Head set	2	10,767,000
3.06.02.01.999	Alat komunikasi telephone lainnya	19	40,071,000
3.10.01.02.003	Note book	2	68,154,000
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	14,009,000
			133,001,000

3. Reklasifikasi masuk aset tetap sebesar Rp216.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian reklasifikasi aset tetap

Semula			Menjadi		
Kode	Nama barang	Nilai	Kode	Nama Barang	Nilai
3.05.02.04.004	AC Split	119,600,000	3.10.02.03.003	Printer	23,000,000
3.06.01.01.036	Microphone	74,000,000	3.05.02.06.016	Mic Conference	74,000,000
3.10.02.03.003	Printer	23,000,000	3.05.02.04.001	AC Split	23,000,000
			3.10.01.02.002	Laptop	96,600,000
		216,600,000			216,600,000

4. Perolehan lainnya sebesar Rp78.505.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Intrakomptabel	Kuantitas	Ekstrakomp
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	2	6,670,000	0	-
3.05.02.01.005	Sice	2	10,400,000	0	-
3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	2,000,000	0	-
3.05.02.04.001	Lemari Es	1	1,265,000	0	-
3.05.02.04.004	AC Split	5	22,400,000	0	-
3.05.02.04.007	Exhaust Fan	0	-	2	1,000,000
3.05.02.06.002	Televisi	1	3,000,000	0	-
3.05.02.06.036	Dispenser	3	3,100,000	2	1,980,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	2,450,000	0	
3.10.02.03.003	Printer	12	24,240,000	0	
		28	75,525,000	4	2,980,000

5. Koreksi pencatatan nilai bertambah sebesar Rp27.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	1,000,000
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	19	25,555,000
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	1,345,000
Jumlah			27,900,000

Mutasi kurang:

1. Perolehan lainnya (aset ekstrakomptabel) sebesar Rp2.980.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Ekstrakomptabel
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	0	-
3.05.02.01.005	Sice	0	-
3.05.02.01.008	Meja Rapat	0	-
3.05.02.04.001	Lemari Es	0	-
3.05.02.04.004	AC Split	0	-
3.05.02.04.007	Exhaust Fan	2	1,000,000
3.05.02.06.002	Televisi	0	-
3.05.02.06.036	Dispenser	2	1,980,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	0	
3.10.02.03.003	Printer	0	
		4	2,980,000

2. Koreksi pencatatan nilai berkurang sebesar Rp11.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.05.02.04.004	AC Split	1	6,400,000
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	19	190,000
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	10,000
3.10.02.03.003	Printer	1	5,100,000
Jumlah			11,700,000

3. Reklasifikasi keluar aset tetap sebesar Rp216.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Semula		Menjadi		Nilai
Kode	Nama barang	Kode	Nama Barang	
3.05.02.04.004	AC Split	3.10.02.03.003	Printer	119,600,000
3.06.01.01.036	Microphone	3.05.02.06.016	Mic Conference	74,000,000
3.10.02.03.003	Printer			23,000,000
				216,600,000

Gedung dan Bangunan
Rp2.920.835.856,00

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.920.835.856,00 dan Rp0,00. Perbandingan saldo tanah

per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Perbandingan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 desember 2024

Jenis	Tahun 2024	Tahun 2023
Gedung dan bangunan	2,920,835,856	2,771,038,441
Jumlah	2,920,835,856	2,771,038,441

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 50. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan

Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2024	2,771,038,656
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	149,797,200
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	149,797,200
Mutasi Kurang	
Hibah Keluar	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	2,920,835,856
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(806,306,838)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2,114,529,018

Mutasi nilai tambah Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp149.797.200,00 merupakan pengerjaan ruangan satpam

Aset Tetap Lainnya
Rp4.000.000,00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp4.000.000,00 dan Rp4.000.000,00. Mutasi aset tetap lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 51. Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

Saldo nilai perolehan per 1 Januari 2024	4,000,000
Mutasi tambah	-
-	
Mutasi kurang	-
-	
Saldo per 31 Desember 2024	4,000,000
Akumulasi penyusutan s.d Desember 2024	-
Nilai buku per 31 Desember 2024	4,000,000

Adapun aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.000.000,00 berupa lukisan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tahun perolehan 2014.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp14.030.329.277,00

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo akumulasi aset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp14.030.329.277,00 dan Rp11.913.234.688,00. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk tanah dan konstuksi dalam pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 52. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	20,531,848,941	13,224,022,439	7,307,826,502
2	Gedung dan Bangunan	2,920,835,856	806,306,838	2,114,529,018
4	Aset tetap Lainnya	4,000,000	-	4,000,000
Akumulasi Penyusutan		23,456,684,797	14,030,329,277	9,426,355,520

Akumulasi penyusutan aset tetap senilai Rp14.030.625.902,00 terdiri dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp13.221.319.064,00 dan akumulasi penyusutan Gedung dan bangunan sebesar Rp806.306.838,00. Rincian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan dijelaskan sebagai berikut:

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp13.224.022.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.01.03	Alat Bantu	2	130,399,287
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	3,615,002,142
3.05.01	Alat Kantor	401	1,428,519,864
3.05.02	Alat Rumah Tangga	1407	2,722,996,753
3.06.01	Alat Studio	51	346,130,262
3.06.02	Alat Komunikasi	18	156,716,780
3.07.01	Alat Kedokteran	20	49,500,000
3.10.01	Komputer Unit	646	3,767,052,568
3.10.02	Peralatan Komputer	327	1,007,704,783
Jumlah		2883	13,224,022,439

- Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp806.306.838,00 dengan kode 4.01.01 Bangunan gedung.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap terlampir pada **lampiran VIII**.

Aset Tak Berwujud
Rp708.749.970,00

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp708.749.970,00 dan Rp708.749.970,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud berupa *software* (website) bawaslu kabupaten/kota yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi aset tetap tak berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 54. Mutasi Aset Tetap Tak Berwujud per 31 Desember 2024

Saldo perolehan per 1 januari 2024	708,749,970
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
-	-
Saldo per 31 Desember 2024	708,749,970
Akumulasi amortisasi per 31 Desember 2024	(701,461,095)
Nilai buku per 31 Desember 2024	7,288,875

Saldo aset tak berwujud sebesar Rp708.749.970,00 terdiri dari:

- Pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan alamat ID <https://ppid.sumbarprov.go.id> sebesar Rp19.316.000,00.
- Website bawaslu kabupaten/kota se-sumatera barat sebesar Rp321.324.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55. Daftar Website Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024

Bawaslu Kabupaten Kota	Alamat ID	Jumlah (Rp)
Kabupaten Padang Pariaman	padangpariaman.bawaslu.go.id	17,000,000.00
Kabupaten Agam	agam.bawaslu.go.id	17,100,000.00
Kabupaten Pesisir Selatan	pesisirselatan.bawaslu.go.id	15,749,090.00
Kabupaten Tanah Datar	tanahdatar.bawaslu.go.id	16,800,000.00
Kabupaten Solok	solokkab.bawaslu.go.id	17,049,500.00
Kabupaten Limapuluh Kota	50kota.bawaslu.go.id	17,040,000.00
Kabupaten Pasaman	pasaman.bawaslu.go.id	17,024,000.00
Kabupaten Dharmasraya	dharmasraya.bawaslu.go.id	17,500,000.00
Kabupaten Sijunjung	sijunjung.bawaslu.go.id	16,800,000.00
Kabupaten Solok Selatan	solokselatan.bawaslu.go.id	16,800,000.00
Kabupaten Pasaman Barat	pasamanbarat.bawaslu.go.id	15,000,000.00
Kabupaten Kep. Mentawai	mentawai.bawaslu.go.id	20,000,000.00
Kota Padang	padang.bawaslu.go.id	15,400,000.00
Kota Payakumbuh	payakumbuh.bawaslu.go.id	16,642,400.00
Kota Pariaman	pariaman.bawaslu.go.id	17,600,000.00
Kota Sawahlunto	sawahlunto.bawaslu.go.id	14,300,000.00
Kota Bukittinggi	bukittinggi.bawaslu.go.id	17,000,000.00
Kota Padang Panjang	padangpanjang.bawaslu.go.id	17,050,000.00
Kota solok	solokkota.bawaslu.go.id	19,470,000.00
TOTAL		321,324,990.00

Pengadaan website PPID Bawaslu kabupaten/kota sebesar Rp368.108.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56. Daftar Website PPID Bawaslu Kabupaten/Kota per 31 Desember 2024

No	Bawaslu Kabupaten Kota	Alamat ID	Jumlah (Rp)
1	Kabupaten Padang Pariaman	https://ppid.padangpariaman.bawaslu.go.id/	19,305,000
2	Kabupaten Agam	https://ppid.agam.bawaslu.go.id/	19,305,000
3	Kabupaten Pesisir Selatan	https://ppid.pesisirselatan.bawaslu.go.id/	19,305,000
4	Kabupaten Tanah Datar	https://ppid.tanahdatar.bawaslu.go.id/	19,455,000
5	Kabupaten Solok	https://ppid.solokkab.bawaslu.go.id/	19,305,000
6	Kabupaten Limapuluh Kota	https://ppid.50kota.bawaslu.go.id/	19,305,000
7	Kabupaten Pasaman	https://ppid.pasaman.bawaslu.go.id/	19,624,000
8	Kabupaten Pasaman Barat	https://ppid.pasamanbarat.bawaslu.go.id/	19,371,000
9	Kabupaten Dharmasraya	https://ppid.dharmasraya.bawaslu.go.id/	19,360,000
10	Kabupaten Kep. Mentawai	https://ppid.mentawai.bawaslu.go.id/	19,635,000
11	Kabupaten Sijunjung	https://ppid.sijunjung.bawaslu.go.id/	19,305,000
12	Kabupaten Solok Selatan	https://ppid.solokselatan.bawaslu.go.id/	19,305,000
13	Kota Padang	https://ppid.padang.bawaslu.go.id/	19,305,000
14	Kota Payakumbuh	https://ppid.payakumbuh.bawaslu.go.id/	19,305,000
15	Kota Pariaman	https://ppid.pariaman.bawaslu.go.id/	19,371,000
16	Kota Sawahlunto	https://ppid.sawahlunto.bawaslu.go.id/	19,305,000
17	Kota Bukittinggi	https://ppid.bukittinggi.bawaslu.go.id/	19,250,000
18	Kota Padang Panjang	https://ppid.padangpanjang.bawaslu.go.id/	19,687,980
19	Kota solok	https://ppid.solokkota.bawaslu.go.id/	19,305,000
TOTAL			368,108,980

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
Rp701.461.095,00

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp701.461.095,00 dan Rp609.433.850,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat asset lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Amortisasi Software Komputer sebesar Rp701.461.095,00. Rincian Akumulasi Amortisasi Software Komputer terlihat pada Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud tahun anggaran 2024 **lampiran VIII**.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp66.339.889,00

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.339.889,00 dan Rp11.229.361,00. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian utang pihak ketiga bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1,897,871	2,616,000
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	64,442,028	8,613,361
Total	66,339,899	11,229,361

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.339.899,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp1.897.871,00 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 58. Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Nilai
250101303000057	30-Jan-25	Kekurangan gaji PNS Bawaslu Provinsi Sumatera barat bulan Desember 2024	1,221,627
250101303000059	30-Jan-25	Kekurangan gaji PNS Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bulan Mei s.d November 2024	676,244
Jumlah			1,897,871

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp64.442.028,00 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 59. Rincian Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Beban langganan listrik	902,847.00
Beban langganan air	5,802,924.00
Beban keperluan perkantoran	5,095,820.00
Beban honor operasional satuan kerja	3,896,000.00
Beban bahan	4,458,000.00
Beban honor output kegiatan	5,340,000.00
Beban barang non operasional lainnya	1,500,000.00
Beban jasa profesi	3,600,000.00
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	100,000.00
Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan	1,557,553.00
Beban perjalanan dinas biasa	30,968,884.00
Beban perjalanan dinas dalam kota	170,000.00
Beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	1,050,000.00
Jumlah	64,442,028.00

Utang jangka pendek lainnya
Rp7.715.995,00

C.12 Utang jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp7.715.995,00 dan Rp3.975.444.000. Utang jangka pendek lainnya antara lain utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Tabel 60. Perbandingan Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor TA 2024 dan TA 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	7,175,995	3,975,444
Total	7,175,995	3,975,444

Utang jangka pendek lainnya terdiri dari utang pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor sebesar Rp7.715.995,00.

Ekuitas

Rp70.298.866.050,00

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing adalah sebesar Rp70.298.866.050,00 dan Rp76.694.941.590,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp70.376.820.164,00 dan kewajiban sebesar Rp77.954.114,00.

Pendapatan
Rp2.624.846,00

D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp2.624.846,00 dan Rp 0,00. Pendapatan negara bukan pajak dirincikan sebagai berikut:

Tabel 61. Perbandingan Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan negara bukan pajak	2,642,846.00	-	100%
Pendapatan hibah		-	-
Jumlah	2,642,846.00	-	-

Rincian pendapatan negara bukan pajak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang sudah disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.175.254,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang sudah disetor per 31 Desember 2024

No	Kabupaten/Kota	NTPN	Tanggal setor	Nominal
1	Kab 50 Kota	0CE1E6U8EU5CPQFR	26-Jan-24	33,357.00
2	Kab Padang Pariaman	F187A1JNFUN5FR1P	29-Jan-24	40,560.00
3	Kab Sijunjung	6C0A63CIFJRUGBOR	30-Jan-24	5,228.00
4	Kota Padang	9FDD96U8EUHE6IAL	31-May-24	941,565.00
5	Kota Padang Panjang	F86F13CIFKA1KR3B	3-Jun-24	97,497.00
6	Kota Bukittinggi	AF4B461QV41M9M0N	20-Jun-24	1,556.00
7	Kabupaten Solok	395D22G4VPO5PHML	21-Jun-24	40,000.00
8	Kabupaten Tanah Datar	D59536U8EU52SN6N	16-Jan-24	13,375.00
9	Kabupaten Tanah Datar	8D0AE7QLUPBSNLAT	8-Aug-24	341,551.00
10	Kabupaten	11D571JNFV8ALU4A	8-Jul-24	162,719.00
11	Kab Pasaman Barat	8624E5UFPP2OTBUQ/1	30-Sep-24	8,674.00
12	Kota Padang Panjang	474F048VVF62O6JD	30-Sep-24	391.00
13	Kec Payakumbuh Timur	978693CIFJR64MHT	4-Jan-24	1,508.00
14	Kec Pulau Punjung	98D5D55DF0NFJDJT	5-Jan-24	1,139.00
15	Kec Timpeh	049010N9VRRHICPQ	5-Jan-24	1,338.00
16	Kec Padang Panjang Barat	7F2551JNFVNTJ40L	30-Dec-24	6,083.00
17	Kec Padang Panjang Timur	722541JNFVNTJ46A	30-Dec-24	5,565.00
18	Kab 50 Kota	F54F31JNFVNVQAGV	31-Dec-24	153,621.00
19	Kec Padang Panjang Barat	1985B1JNFVNVQAQK	31-Dec-24	5,668.00
20	Kec Padang Panjang Timur	545183CIFKSOKATP	31-Dec-24	13,228.00
21	Kab Pesisir Selatan	8F27D6U8EV6A8B23	31-Dec-24	76,326.00
22	Kab Pasaman Barat	4AC757NAPH18PC5M/1	31-Dec-24	9,098.00
23	Kab Pasaman Barat	4E6D05UFPRSFVMRF/1	31-Dec-24	159,289.00
24	Kab Pasaman Barat	62E2645KQ6NN5CJP/1	31-Dec-24	27,180.00
25	Kab Pasaman Barat	650F15UFPRSFVCLP/1	31-Dec-24	9,554.00
26	Kab Pasaman Barat	945527NAPH18PC70/1	31-Dec-24	10,761.00
27	Kab Pasaman Barat	B17DA5UFPRSFVCI9/1	31-Dec-24	1,628.00
28	Kab Pasaman Barat	BA25F7NAPH18PCOG/1	31-Dec-24	3,828.00
29	Kab Pasaman Barat	C9307397AC5AOC92/1	31-Dec-24	141.00
30	Kab Pasaman Barat	E3EE25UFPRSFVC9R/1	31-Dec-24	1,258.00
31	Kab Pasaman Barat	E50C62CPQHIUBCL6/1	31-Dec-24	1,568.00
Jumlah				2,175,254.00

2. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp449.592,00 yang berasal dari denda keterlambatan penyelesaian kontrak 009/Bawaslu-SB/SP/JS/09/2024 Pengadaan Pakaian Dinas Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
- Terdapat perbedaan jumlah pendapatan pada laporan realisasi anggaran dibandingkan jumlah pendapatan pada laporan operasional per 31 Desember 2024. Hasil mutasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 63. Rincian Mutasi Pendapatan

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	708,208,293
Mutasi Kurang	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13,222,184
Penerimaan Kembali Barang TAYL	691,209,675
Jurnal balik atas Jasa Giro per 31 des 2023 yang belum disetor	1,151,588
Jumlah Mutasi Kurang:	705,583,447
Jasa Giro LO	2,624,846

Penjelasan Mutasi:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp13.222.184,00 dengan nomor NTPN 60AC30NA04J32C4U merupakan pendapatan yang diperoleh dari lelang non eksekusi dengan nomor risalah lelang 231/03.01/2024-01 tanggal 7 Juni 2024.
2. Penerimaan Kembali Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp689.597.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64. Rincian Pengembalian Tahun Anggaran Yang Lalu

No	Uraian	NTPN	Nilai
1	Kab Solok	B6E902G4VP8NI0R8	215,492,994
2	Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	241,386,894
3	Kab Solok Selatan	381DE3CIFJRBMGKD	60,298,250
4	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	9,365,688
5	Kab Tanah Datar	A032C7QLUONF9LNS	91,927,739
6	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	3,000
7	Kab Padang Pariaman	CADF255DF90N3D0H	900,000
8	Kab Solok	7CFEB1JNFUN6QLT9	1,805,000
9	Kab Agam	C67061JNFUPV7KM9	1,032,190
10	Kota Payakumbuh	E592555DF96EE4J0	7,063,000
11	Kota Padang Panjang	DA89248VVEK8G5LQ	48,000
12	Kota Solok	24EA20NA04CU2CO9	1,175,000
13	Kota Solok	DFFAF1JNFVB5SKNG	1,231,770
14	Kota Sawahlunto	9E8F77QLUP0NARA4	2,500,000
15	Kota Payakumbuh	B01F93CIFK76QSPV	9,500,000
16	Kab Pasaman	A0EEC48VVEPRQ7LB	5,700,000
17	Kab Pasaman	DCAE748VVF2N9041	380,000
18	Kab Pasaman Barat	CF9541JNFV2LHM9F	14,000,000
19	Kab Kepulauan Mentawai	3018448VVET2NRMO	27,400,150
Jumlah			691,209,675

3. Jurnal balik atas jasa giro tahun 2023 yang belum disetorkan per 31 desember sebesar Rp1.151.588,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NTPN	Nominal
Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	699,500
Kab Solok Selatan	0640E0NA0446FI02	97,532
Kab Tanah Datar	D59536U8EU52SN6N	130,185
Kab Mentawai	A82D061QV3IPPVCA	224,371
Total		1,151,588

Beban Pegawai
Rp24.402.688.055,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp24.402.688.055,00 dan Rp15.806.640.527,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 65. Rincian Belanja Pegawai TA 2024

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,802,837,769	1,584,591,992	14%
Beban Pembulatan Gaji PNS	29,069	25,243	15%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	106,636,390	83,226,522	28%
Beban Tunj. Anak PNS	32,630,830	23,720,328	38%
Beban Tunj. Struktural PNS	246,754,712	199,298,000	24%
Beban Tunj. Fungsional PNS	32,382,000	29,391,000	10%
Beban Tunj. PPh PNS	139,498,431	167,000,848	-16%
Beban Tunj. Beras PNS	95,666,820	85,600,440	12%
Beban Tunj. Uang Makan PNS	395,784,000	482,703,000	-18%
Beban Tunjangan Umum PNS	70,530,000	82,485,000	-14%
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	10,840,240,261	10,479,603,700	3%
Beban Gaji Pokok PPPK	3,105,034,800	94,928,000	100%
Beban Pembulatan Gaji PPPK	32,604	724	100%
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	194,212,800	3,559,800	100%
Beban Tunjangan Anak PPPK	44,624,840	949,280	100%
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	225,900,000	17,280,000	100%
Beban Tunjangan Beras PPPK	165,407,280	4,345,200	100%
Beban Uang Makan PPPK	359,494,000	35,754,000	100%
Beban Uang Lembur	208,281,000	153,724,000	35%
Beban Uang Lembur PPPK	25,811,000	16,795,000	100%
Beban Pegawai (Tunjangan khusus/kegiatan)	3,117,641,120	2,167,994,450	44%
Beban Pegawai Tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK	3,193,258,329	93,664,000	100%
Jumlah	24,402,688,055	15,806,640,527	54%

Terdapat perbedaan jumlah belanja pegawai pada laporan realisasi anggaran dibandingkan jumlah beban pegawai pada laporan operasional per 31 Desember 2024. Hasil mutasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 66. Mutasi Belanja Pegawai TA 2024

Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai LRA	24,403,406,184
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024	1,897,871
Jumlah	24,405,304,055
Mutasi Kurang	
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TAYL	
Tunj Khusus/kegiatan	2,616,000
Tunj. Struktural PNS	-
Jumlah	2,616,000
Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2024	24,402,688,055

Penjelasan Mutasi:

Mutasi Tambah:

1. Mutasi tambah belanja pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 senilai Rp1.897.871,00 merupakan pembayaran kekurangan gaji akibat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Berikut rincian belanja pegawai yang masih harus dibayar:

No SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Nilai
250101303000057	30-Jan-25	Kekurangan gaji PNS Bawaslu Provinsi Sumatera barat bulan Desember 2024	1,221,627
250101303000059	30-Jan-25	Kekurangan gaji PNS Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bulan Mei s.d November 2024	676,244
Jumlah			1,897,871

Mutasi Kurang:

1. Mutasi kurang diperoleh dari jurnal balik atas belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun anggaran yang lalu berupa kekurangan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2023 PNS Bawaslu Kabupaten Kep Mentawai an. Mansyur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Rincian Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2023

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Uraian	Nilai
240101303000435	16-Feb-24	Pembayaran tunjangan kinerja susulan bulan Desember tahun 2023 untuk 1 {satu} Pegawai Bawaslu Mentawai.	2,616,000
Jumlah			2,616,000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp2.874.925.804,00 dan Rp59.287.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 68. Perbandingan Belanja Persediaan TA 2024 dan TA 2023

Jenis beban	TH 2024	TH 2023	Naik (turun) %
Beban Persediaan Barang Konsumsi	2,874,925,804	59,287,000	4749.17%
Jumlah	2,874,925,804	59,287,000	4749.17%

Saldo beban persediaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 4749.17 persen dibandingkan saldo beban persediaan per 31 Desember 2023 dikarenakan pemakaian persediaan disesuaikan dengan kebutuhan persediaan perbulan.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang persediaan dibandingkan beban persediaan per 31 Desember 2024. Mutasi beban persediaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 69. Mutasi Beban Persediaan

Mutasi tambah:	
Saldo awal	-
Barang konsumsi	-
Utang yang belum diterima tagihannya	
Perolehan Lainnya	2,808,502,000
belanja barang persediaan barang konsumsi	66,423,804
jumlah mutasi tambah:	2,874,925,804
Mutasi kurang:	
Barang konsumsi	-
persediaan lainnya	-
jumlah mutasi kurang:	-
jumlah beban barang persediaan per 31 Desember 2024	2,874,925,804

Mutasi tambah:

1. Perolehan lainnya merupakan perolehan atas persediaan berupa penanda identitas PTPS yang sudah didistribusikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.808.502.000,00.
2. Belanja persediaan barang konsumsi sebesar Rp66.423.804,00 merupakan pembelian barang persediaan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing

masing sebesar Rp177.638.353.515,00 dan Rp105.759.862.269,00. Beban barang dan jasa terdiri dari beban barang dan/jasa dalam penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian beban barang/jasa per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Kantor	30,192,634,549	14,309,062,791	111.00%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	246,600	268,000	-7.99%
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,031,743,000	1,736,176,000	-40.57%
Beban Barang Operasional Lainnya	1,480,341,400	435,271,750	240.10%
Beban Bahan	20,999,326,264	7,885,450,009	166.30%
Beban Honor Output Kegiatan	87,388,496,135	59,085,800,000	47.90%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	10,268,301,105	-	100.00%
Beban langganan listrik	815,316,024	821,431,810	-0.74%
Beban Langganan telepon	8,443,590	9,092,515	-7.14%
Beban Langganan Air	125,618,424	122,546,989	2.51%
Beban Sewa	21,369,631,924	19,237,309,405	11.08%
Beban Jasa Profesi	2,933,881,500	1,801,790,000	62.83%
Beban Jasa Lainnya	1,021,393,000	289,623,000	252.66%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan mesin ekstrakomptabel	2,980,000	10,540,000	-71.73%
Beban Peralatan dan mesin ekstrakomptabel	0	15,500,000	-100.00%
Total	177,638,353,515	105,759,862,269	67.96%

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 67.97 persen. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja barang pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan anggaran belanja barang pada tahun 2023 dan kegiatan fasilitasi pengawasan tahapan pemilu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi belanja barang dan jasa dibandingkan jumlah beban barang dan jasa per 31 Desember 2024, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 71. Mutasi Beban Persediaan TA 2024

Mutasi Tambah:	
Belanja Keperluan Perkantoran	30,190,987,235
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	246,600
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,027,847,000
Belanja Barang Operasional Lainnya	1,480,341,400
Belanja Bahan	20,994,868,264
Belanja Honor Output Kegiatan	87,383,156,135
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,266,801,105
Belanja Langganan Listrik	816,459,522
Belanja Langganan Telepon	8,443,590
Belanja Langganan Air	122,934,010
Belanja Sewa	21,665,488,590
Belanja Jasa Profesi	2,930,281,500
Belanja Jasa Lainnya	1,021,393,000
jurnal balik sewa dibayar dimuka per 31 des 2024	354,426,667
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	30,595,591
Beban aset ekstakomptabel	2,980,000
Jumlah Mutasi Tambah	178,297,250,209
Mutasi Kurang	
penyesuaian atas prepaid 2024	637,683,333
jurnal balik beban TAYL	8,613,361
pembukuan ganda belanja sewa	12,600,000
Jumlah Mutasi Kurang	658,896,694
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Des 2024	177,638,353,515

Beban Pemeliharaan
Rp2.160.295.630,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp2.160.295.630,00 dan Rp2.009.978.337,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 72. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39,755,315	159,583,035	-75.09%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,120,540,315	1,850,395,302	14.60%
Jumlah	2,160,295,630	2,009,978,337	7.48%

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 7.48 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2023 Hal ini disebabkan oleh adanya bertambahnya jumlah peralatan dan mesin yang miliki sehingga beban pemeliharaan

meningkat.

Terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan pada laporan operasional dengan belanja pemeliharaan pada laporan realisasi anggaran. Rincian mutasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Mutasi tambah:	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,120,440,315
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38,197,762
belanja barang yang masih harus dibayar	1,657,553
Jumlah mutasi tambah	2,160,295,630
Mutasi kurang:	
Jumlah mutasi kurang:	-
Jumlah beban pemeliharaan peralatan dan mesin per 31 Desember 2024	2,160,295,630

Beban Perjalanan

Dinas

Rp134.815.246.512,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp134.815.246.512,00 dan Rp52.969.650.881,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun) %
Beban perjalanan dinas biasa	33,767,634,691	16,875,306,088	100%
Beban perjalanan dinas dalam kota	48,262,400,752	14,552,787,058	232%
beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	43,300,870,882	17,093,762,800	153%
beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	9,484,340,187	4,447,794,935	113%
Jumlah	134,815,246,512	52,969,650,881	155%

Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 155 persen dibandingkan per 30 desember 2023. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan untuk fasilitasi pengawasan di tahapan pemilu yang sedang berjalan.

Terdapat perbedaan jumlah belanja perjalanan dinas pada laporan realisasi anggaran dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas pada laporan operasional per 31 september 2024. Rincian mutasi dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 74. Rincian Mutasi Beban Perjalanan Dinas TA 2024

Mutasi tambah:	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,764,130,939.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,275,610,563.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	43,301,410,882.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,484,340,187.00
belanja barang yang masih harus dibayar	32,638,884
Jumlah mutasi tambah	134,815,246,512
Mutasi kurang:	
pembukuan ganda beban perjadi dalam kota	14,429,811
pembukuan ganda beban perjadi biasa	27,465,132
pembukuan ganda beban perjadi paket meeting dalam	540,000
penyesuaian tunggakan beban perjalanan dinas dalam k	450,000
Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember 2024	134,815,246,512

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp2.210.721.834,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp2.210.721.834,00 dan Rp1.361.684.131,00. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud. Rincian beban penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 75. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024

Uraian	TH 2024	TH 2023	Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,052,565,929	1,188,581,646	73%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66,128,660	31,836,484	
Beban Penyusutan Jaringan	-	266,667	-100%
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional	-	3,977,466	-100%
Jumlah Penyusutan	2,118,694,589	1,224,662,263	73%
Beban Amortisasi software	92,027,245	137,021,868	-33%
Jumlah amortisasi	92,027,245	137,021,868	-33%
Jumlah beban penyusutan dan amortisasi	2,210,721,834	1,361,684,131	62%

Tidak terdapat selisih antara beban penyusutan dan amortisasi pada laporan operasional dibandingkan dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi pada neraca per 31 Desember 2024.

D.8 Kegiatan Non Operasional

D.8.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pos defisit dari surplus/deficit pelepasan aset non lancar per 31 Desember 2024 senilai Rp13.222.184,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76. Rincian kegiatan non operasional per 30 juni 2024

Uraian	Nilai
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	13,222,184
Total	13,222,184

Defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp13.222.184,00) dirincikan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp13.222.184,00 merupakan pendapatan dari penjualan pendapatan yang diperoleh dari lelang non eksekusi dengan nomor risalah lelang 231/03.01/2024-01 tanggal 7 Juni 2024 dengan nomor NTPN 60AC30NA04J32C4U. Bukti setor/Simponi terlampir pada **lampiran I**.

D.8.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp167.659.068,00.

Uraian	Nilai
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	89,154,068
Pendapatan perolehan aset lainnya	78,505,000
Total	167,659,068

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya sebesar Rp164.679.068,00 merupakan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya yang dirincikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp89.154.068,00
Terdapat perbedaan jumlah penerimaan kembali belanja barang TAYL pada laporan realisasi anggaran dibandingkan jumlah penerimaan kembali belanja barang TAYL pada laporan operasional per 31 Desember 2024. Hasil mutasi dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:	
Penerimaan kembali belanja barang TAYL-LRA	691,209,675.00
Jumlah Mutasi Tambah:	691,209,675.00
Mutasi Kurang:	
Jurnal Balik atas penerimaan kembali belanja barang TA 2023	602,055,607.00
Jumlah Mutasi Kurang:	602,055,607.00
Jumlah penerimaan kembali belanja barang TAYL-LO	89,154,068.00

Jurnal balik penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu merupakan pengembalian sisa dana RDP Tahun 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	NTPN	Jumlah
1	10-Jan-24	381DE3CIFJRBMGKD	60,298,250.00
2	16-Jan-24	A032C7QLUONF9LNS	91,927,739.00
3	3-Jan-24	B6E902G4VP8NI0R8	215,492,994.00
4	29-May-24	39AED3CIFJRABH3R	234,333,624.00
Total			386,559,613.00

Dengan adanya jurnal balik tersebut, penerimaan kembali beban barang tahun anggaran yang lalu pada Laporan Operasional dapat dirinci sebagai berikut:

No	Tanggal	NTPN	Jumlah
1	4-Apr-24	24EA20NA04CU2CO9	1,175,000.00
2	26-Apr-24	9E8F77QLUP0NARA4	2,500,000.00
	16-May-24	A0EEC48VVEPRQ7LB	5,700,000.00
	17-May-24	CF9541JNFV2LHM9F	14,000,000.00
	25-Jun-24	3018448VVET2NRMO	27,400,150.00
	3-Aug-24	DFFAF1JNFVB5SKNG	1,231,770.00
	15-Aug-24	DCAE748VVF2N9041	380,000.00
	31-Jan-24	7CFEB1JNFUN6QLT9	1,805,000.00
	26-Feb-24	C67061JNFUPV7KM9	1,302,190.00
	26-Mar-24	E592555DF96EE4J0	7,063,000.00
	30-Mar-24	DA89248VVEK8G5LQ	48,000.00
	7-May-24	B01F93CIFK76QSPV	9,500,000.00
	10-Jan-24	F040248VVEDO20S0	9,365,688.00
	19-Jan-24	8C8343CIFJRKIV1T	3,000.00
	29-Jan-24	CADF255DF90N3D0H	900,000.00
			82,373,798.00

2. Pendapatan perolehan aset lainnya sebesar Rp78.505.000,00

D.9 Surplus/Defisit LO

Defisit LO per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar (Rp343.918.725.252,00) dan (Rp117.967.297.923,00).

E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp76.694.941.590,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp76.694.941.590,00 dan Rp2.231.757.078,00.

Surplus (Defisit) LO

(Rp343.918.725.252,00)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp343.918.725.252,00) dan (Rp177.967.297.923,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang

Menambah/Mengur

angi Ekuitas

(Rp17.800.000,00)

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing dengan nilai sebesar (Rp17.800.000,00) dan (Rp660.703.364,00). Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas dirincikan sebagai berikut:

1. Koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp1.600.000,00 dengan rincian:

Kode barang	Aset	Harga satuan	Jumlah	Direklasifikasi menjadi	
				Kode barang	nama barang
3100203003	Printer	10,200,000	1	3050204004	AC Split
3050204004	A.C Split	12,800,000	1	3100203003	Printer

2. Koreksi nilai aset non revaluasi sebesar Rp16.200.000,00 dengan rincian:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
3.05.02.04.004	A.C Split	1	6,400,000.00
3.10.02.03.003	Printer	1	5,100,000.00
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	19	190,000.00
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	10,000.00
3.06.01.02.128	Camera Digital	1	(1,000,000.00)
3.06.02.01.999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	19	(25,555,000.00)
3.10.01.02.009	Tablet PC	1	(1,345,000.00)
Jumlah			(16,200,000.00)

Koreksi Lain

Lain

Rp0,00

E.4 Koreksi Lain Lain

Koreksi lain lain untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi lain lain adalah koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, koreksi atas piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.337.533.284.557,00*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.337.533.284.557,00 dan Rp253.091.185.799,00. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal LK, antar LK, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 77. Rincian Transaksi Antar Entitas

Uraian	TA 2024	TA 2023
Ditagihan ke entitas lain	200,787,870,410	114,458,491,459
Diterima dari entitas lain	(708,208,293)	(3,710,145)
Pengesahan Hibah Langsung	137,320,621,440	-
Transfer Masuk	133,001,000	3,784,319,170
Total	337,533,284,557	118,239,100,484

1. Penjelasan Dikeluarkan dari entitas lain:

Dikeluarkan dari entitas lain merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

Tabel 78. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

No	Ditagihkan ke entitas lain	Nilai
1	Belanja Pegawai	24,403,406,184
2	Belanja Barang	314,959,802,403
3	Belanja Modal	6,649,389,700
4	Pengesahan Belanja Hibah Langsung	(145,224,727,877)
Jumlah		200,787,870,410

2. Penjelasan Diterima dari entitas lain:

Diterima ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar (Rp708.208.293,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain

Uraian	Nilai
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	691,209,675
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13,222,184
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	449,592
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3,326,842
Total	708,208,293

1. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp691.209.675,00 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	Uraian	NTPN	Nilai
1	Kab Solok	B6E902G4VP8NIOR8	215,492,994
2	Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	241,386,894
3	Kab Solok Selatan	381DE3CIFJRBMGKD	60,298,250
4	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	9,365,688
5	Kab Tanah Datar	A032C7QLUONF9LNS	91,927,739
6	Kota Padang	F040248VVEDO20S0	3,000
7	Kab Padang Pariaman	CADF255DF90N3D0H	900,000
8	Kab Solok	7CFEB1JNFUN6QLT9	1,805,000
9	Kab Agam	C67061JNFUPV7KM9	1,032,190
10	Kota Payakumbuh	E592555DF96EE4J0	7,063,000
11	Kota Padang Panjang	DA89248VVEK8G5LQ	48,000
12	Kota Solok	24EA20NA04CU2CO9	1,175,000
13	Kota Solok	DFFAF1JNFVB5SKNG	1,231,770
14	Kota Sawahlunto	9E8F77QLUP0NARA4	2,500,000
15	Kota Payakumbuh	B01F93CIFK76QSPV	9,500,000
16	Kab Pasaman	A0EEC48VVEPRQ7LB	5,700,000
17	Kab Pasaman	DCAE748VVF2N9041	380,000
18	Kab Pasaman Barat	CF9541JNFV2LHM9F	14,000,000
19	Kab Kepulauan Mentawai	3018448VVET2NRMO	27,400,150
Jumlah			691,209,675

2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.222.184,00 dengan nomor NTPN 60AC30NA04J32C4U merupakan pendapatan yang diperoleh dari lelang non eksekusi dengan nomor risalah lelang 231/03.01/2024-01 tanggal 7 Juni 2024.
3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp3.326.842,00 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 81. Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

No	Kabupaten/Kota	NTPN	Tanggal setor	Nominal
1	Kab 50 Kota	OCE1E6U8EU5CPQFR	26-Jan-24	33,357
2	Kab Padang Pariaman	F187A1JNFUN5FR1P	29-Jan-24	40,560
3	Kab Sijunjung	6C0A63CIFJRUGBOR	30-Jan-24	5,228
4	Kota Padang	9FDD96U8EUHE6IAL	31-May-24	941,565
5	Kota Padang Panjang	F86F13CIFKA1KR3B	3-Jun-24	97,497
6	Kota Padang Panjang	474F048VVF62O6JD	30-Sep-24	391
7	Kota Bukittinggi	AF4B461QV41M9M0N	20-Jun-24	1,556
8	Kab Solok	395D22G4VPO5PHML	21-Jun-24	40,000
9	Kab Tanah Datar	D59536U8EU52SN6N	16-Jan-24	143,560
10	Kab Tanah Datar	8D0AE7QLUPBSNLAT	8-Aug-24	341,551
11	Kec Payakumbuh Timur	978693CIFJR64MHT	4-Jan-24	1,508
12	Kec Pulau Punjung	98D5D55DFONFJDJT	5-Jan-24	1,139
13	Kecamatan Timpeh	049010N9VRRHICPQ	5-Jan-24	1,338
14	Kab Pasaman	39AED3CIFJRABH3R/1	29-May-24	699,500
15	Kab Pasaman Barat	8624E5UFP2OTBUQ/1	30-Sep-24	8,674
16	Kab Solok Selatan	0640E0NA0446FI02	10-Jan-24	97,532
17	Kab Kepulauan Mentawai	A82D061QV3IPVCA	19-Jan-24	224,371
18	Kab Pasaman Barat	11D571JNFV8ALU4A	8-Jul-24	162,719
19	Kec Padang Panjang Barat	7F2551JNFVNTJ40L	30-Dec-24	6,083
20	Kec Padang Panjang Timur	722541JNFVNTJ46A	30-Dec-24	5,565
21	Kab 50 Kota	F54F31JNFVNVQAGV	31-Dec-24	153,621
22	Kec Padang Panjang Barat	1985B1JNFVNVQAQK	31-Dec-24	5,668
23	Kec Padang Panjang Timur	545183CIFKSOKATP	31-Dec-24	13,228
24	Kab Pesisir Selatan	8F27D6U8EV6A8B23	31-Dec-24	76,326
25	Kab Pasaman Barat	4AC757NAPH18PC5M/1	31-Dec-24	9,098
26	Kab Pasaman Barat	4E6D05UFPRSFVMRF/1	31-Dec-24	159,289
27	Kab Pasaman Barat	62E2645KQ6NN5CJP/1	31-Dec-24	27,180
28	Kab Pasaman Barat	650F15UFPRSFVCLP/1	31-Dec-24	9,554
29	Kab Pasaman Barat	945527NAPH18PC70/1	31-Dec-24	10,761
30	Kab Pasaman Barat	B17DA5UFPRSFVCI9/1	31-Dec-24	1,628
31	Kab Pasaman Barat	BA25F7NAPH18PCOG/1	31-Dec-24	3,828
32	Kab Pasaman Barat	C9307397AC5AOC92/1	31-Dec-24	141
33	Kab Pasaman Barat	E3EE25UFPRSFVC9R/1	31-Dec-24	1,258
34	Kab Pasaman Barat	E50C62CPQHIUBCL6/1	31-Dec-24	1,568.00
Jumlah				3,326,842

3. Pengesahan hibah langsung senilai Rp137.320.621.440,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82. Rincian Pengesahan Hibah Langsung

Bawaslu Kab/Ko	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nominal
PROVINSI SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	9897326862182401	RPL 010 PDHL PILGUB PRO SUMBAR	26,221,582,000
BAWASLU KAB. AGAM	BANK NAGARI	9000016862182501	RPL 010 PDH PILBUP AGAM	11,400,000,000
BAWASLU KAB. PASAMAN	BANK NAGARI	9000016862182502	RPL 010 PDH PILBUP PASAMAN	7,712,636,400
BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	BANK NAGARI	9000016862182503	RPL 010 PDH PILBUP PASABAR	6,420,000,000
BAWASLU KAB. 50 KOTA	BNI	9897436862182520	RPL 010 PDH PILBUP LIMAPUKO	7,200,000,000
BAWASLU KAB. TANAH DATAR	BNI	9897436862182522	RPL 010 PDH PILBUP TANAHDTR	7,504,614,600
BAWASLU KAB. SOLOK	BANK NAGARI	9000016862182504	RPL 010 PDH PILBUP SOLOK	7,557,274,040
BAWASLU KAB. SOLOK SELATAN	BANK NAGARI	9000016862182505	RPL 010 PDH PILBUP SOLSEL	3,600,000,000
BAWASLU KAB. PESISIR SELATAN	BANK NAGARI	9000016862182507	RPL 010 PDH PILBUP SIRSEL	11,700,805,000
BAWASLU KAB. PADANG PARIAMAN	BANK NAGARI	9000016862182506	RPL 010 PDHL PILBUP PDGPARIA	7,800,000,000
BAWASLU KAB SIJUNJUNG	BNI	9897436862182521	RPL 010 PDH PILBUP SIJUNJUNG	6,300,000,000
BAWASLU KAB. DHAMASRAYA	BANK NAGARI	9000016862182508	RPL 010 PDH PILBUP DHARSRA	6,600,000,000
BAWASLU KAB. KEP. MENTAWAI	BANK NAGARI	9000016862182509	RPL 010 PDH PILBUP MENTAWAI	4,808,244,000
BAWASLU KOTA BUKITINGGI	BANK NAGARI	9000016862182513	RPL 010 PDH PILBUP BUKTING	3,167,409,000
BAWASLU KOTA PADANG	BANK NAGARI	9000016862182510	RPL 010 PDH PILKOT PADANG	6,465,000,000
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	BRI	654266862182501	RPL 010 PDH PILKOT PDPANJANG	2,223,275,000
BAWASLU KOTA PARIAMAN	BANK NAGARI	9000016862182511	RPL 010 PDH PILKOT PARIAMAN	3,289,781,400
BAWASLU KOTA SOLOK	BANK NAGARI	9000016862182512	RPL 010 PDH PILKOT SOLOK	2,400,000,000
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	BANK NAGARI	9000016862182514	RPL 010 PDH PILKOT PAYAKBH	3,120,000,000
BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO	BANK NAGARI	9000016862182515	RPL 010 PDH PILKOT SAWAHLT	1,830,000,000
Total				137,320,621,440

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah (Rp6.367.640.695,00) dan Rp74.463.184.512,00.

Tabel 83. Mutasi Kenaikan dan Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2024

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	TA 2024	TA 2023
Surplus/Defisit LO	(343,918,725,252)	(177,967,297,923)
koreksi atas reklasifikasi	1,600,000	
Koreksi nilai aset non revaluasi	16,200,000	(660,703,364)
Lain lain	-	-
Transaksi antar entitas	337,533,284,557	253,091,185,799
Jumlah	(6,367,640,695)	74,463,184,512

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing masing sebesar Rp70.327.300.895,00 dan Rp76.694.941.590,00. Nilai ekuitas akhir merupakan nilai ekuitas awal sebesar Rp76.694.941.590,00 dikurang penurunan ekuitas sebesar Rp6.367.640.695,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan menggantikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang berlaku terhitung mulai tanggal 08 April 2022.

Dalam SOTK yang baru Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di kategorikan kelas A, terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi; dan
- e. Pejabat fungsional.

Adapun klasifikasi kategori Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

Tabel 84. Daftar Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat Bawaslu Prov Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	SK
1.	Karnalis Kamaruddin, S.H, M.Si	Kepala Sekretariat	0591/BAWAS LU/SJ/KP.04.0 0/II/2017 tanggal 13 Mei 2017
2.	Mafral, S.E, M.M	Kepala Bagian Administrasi	2133/KP.04.00/ SJ/06/2022 tanggal 17

			September 2022
3.	Drs. Andi Bastian M.Si	Kepala Bagian Pengawasan	0217/BAWAS LU/SJ/KP.04.0 0/II/2021 tanggal 07 Februari 2021
4.	Eriyanti, S.H	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	1141/BAWAS LU/SJ/KP.04.0 0/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021
5.	Roza Molina, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi	1141/BAWAS LU/SJ/KP.04.0 0/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2022
6.	Nurelida, A.Md	Pejabat Fungsional	0507/Bawaslu/ SJ/KP.05.01/II/ 2021

a. Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe A

- 1) Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Bawaslu Kabupaten Agam;
- 3) Bawaslu Kabupaten Solok; dan
- 4) Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

b. Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B

- 1) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- 2) Bawaslu Kabupaten Kep. Mentawai;
- 3) Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- 4) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;
- 5) Bawaslu Kabupaten Sijunjung;
- 6) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

- 7) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- 8) Bawaslu Kabupaten Dharmasraya;
- 9) Bawaslu Kota Padang;
- 10) Bawaslu Kota Pariaman;
- 11) Bawaslu Kota Sawahlunto;
- 12) Bawaslu Kota Payakumbuh;
- 13) Bawaslu Kota Solok;
- 14) Bawaslu Kota Bukittinggi; dan
- 15) Bawaslu Kota Padang Panjang.

F.2 REKENING YANG DIKELOLA

Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (686218) memiliki 20 rekening aktif untuk pengeluaran belanja yang ditatausahakan oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu untuk penampung dana APBN, rekening dana pemilu, dan rekening penampung dana hibah. Berikut rincian rekening penampung dana APBN dan Hibah:

Tabel 85. Daftar Rekening penampung dana APBN (BNI) yang dikelola

No	Satuan Kerja (686218)	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening
1	Provinsi Sumatera Barat	BNI	1156862185	BPG 010 Sekretariat Bawaslu Sumbar
2	Kab. Agam	BNI	612976806	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS AGAM
3	Kab. Pasaman	BNI	611025841	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PASAMAN
4	Kab. Pasaman Barat	BNI	0612057328	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PASBAR
5	Kab. 50 Kota	BNI	611206419	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS 50 KOTA
6	Kab. Tanah Datar	BNI	0611414408	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS TNH DATAR
7	Kab. Solok	BNI	0610785712	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS KAB SOLOK
8	Kab. Solok Selatan	BNI	0610677988	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS SOLSEL
9	Kab. Pesisir Selatan	BNI	611701208	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PESSSEL
10	Kab. Padang Pariaman	BNI	0611461196	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PDG PRMN
11	Kab. Sijunjung	BNI	610910303	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS SIJUNJUNG
12	Kab. Dharmasraya	BNI	612346503	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS DHAMASRAYA
13	Kab. Kep. Mentawai	BNI	610965206	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS MENTAWAI
14	Kota Bukittinggi	BNI	612048574	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS BUKITINGGI
15	Kota Padang	BNI	610915266	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PADANG
16	Kota Padang Panjang	BNI	3005005015	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PDG PJG
17	Kota Pariaman	BNI	0610636373	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PARIAMAN
18	Kota Solok	BNI	0610954953	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS SOLOK
19	Kota Payakumbuh	BNI	0610966753	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS PAYAKUMBUH
20	Kota Sawahlunto	BNI	250507081	BPP 010 BAWASLU SB PANWAS SAWAHLUNTO

Berikut rincian rekening dana pemilu:

Tabel 86. Daftar Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)

Satuan Kerja	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening
Provinsi Sumatera Barat	BRI	066901001194305	RPL 010 PS BAWASLU PROV SUMBAR UNTUK PEMILU
Kab. Agam	BRI	066701001032301	RPL 010 PS BAWASLU KAB AGAM UTK PEMILU
Kab. Pasaman	BRI	026901002062305	RPL 010 PS BAWASLU KAB PASAMAN UTK PEMILU
Kab. Pasaman Barat	BRI	061501001463305	RPL 010 PS BAWASLU KAB PASBAR UTK PEMILU
Kab. 50 Kota	BRI	025601002011309	RPL 010 PS BAWASLU KAB 50 KOTA UTK PEMILU
Kab. Tanah Datar	BRI	016901001780300	RPL 010 PS BAWASLU KAB TANAH DTR UTK PEMILU
Kab. Solok	BRI	009101002575309	RPL 010 PS BAWASLU KAB SOLOK UTK PEMILU
Kab. Solok Selatan	BRI	204301000916302	RPL 010 PS BAWASLU KAB SOL SEL UTK PEMILU
Kab. Pesisir Selatan	BRI	027001002211309	RPL 010 PS BAWASLU KAB PES SEL UTK PEMILU
Kab. Padang Pariaman	BRI	032101002545307	RPL 010 PS BAWASLU KAB PDG PRM UTK PEMILU
Kab. Sijunjung	BRI	027101001446303	RPL 010 PS BAWASLU KAB SIJUNJUNG UTK PEMILU
Kab. Dharmasraya	BRI	061601001282305	RPL 010 PS BAWASLU KAB DHARMASRAYA UTK PEMILU
Kab. Kep Mentawai	BRI	791901000105301	RPL 010 PS BAWASLU KAB KEP MTW UTK PEMILU
Kota Bukittinggi	BRI	01501002485302	RPL 010 PS BAWASLU KOTA BUKITTINGGI UTK PEMILU
Kota Padang	BRI	066901001192303	RPL 010 PS BAWASLU KOTA PADANG UTK PEMILU
Kota Padang Panjang	BRI	023101001611304	RPL 010 PS BAWASLU KOTA PDG PANJANG UTK PEMILU
Kota Pariaman	BRI	032101002546303	RPL 010 PS BAWASLU KOTA PARIAMAN UTK PEMILU
Kota Solok	BRI	009101002572301	RPL 010 PS BAWASLU KOTA SOLOK UTK PEMILU
Kota Payakumbuh	BRI	025601002010303	RPL 010 PS BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UTK PEMILU
Kota Sawahlunto	BRI	553401000213308	RPL 010 PS BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO UTK PEMILU

Berikut rincian rekening penampung dana hibah:

Bawaslu Kab/Ko	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening
PROVINSI SUMATERA BARAT	BANK NAGARI	9897326862182401	RPL 010 PDHL PILGUB PRO SUMBAR
BAWASLU KAB. AGAM	BANK NAGARI	9000016862182501	RPL 010 PDH PILBUP AGAM
BAWASLU KAB. PASAMAN	BANK NAGARI	9000016862182502	RPL 010 PDH PILBUP PASAMAN
BAWASLU KAB. PASAMAN BARAT	BANK NAGARI	9000016862182503	RPL 010 PDH PILBUP PASABAR
BAWASLU KAB. 50 KOTA	BNI	9897436862182520	RPL 010 PDH PILBUP LIMAPUKO
BAWASLU KAB. TANAH DATAR	BNI	9897436862182522	RPL 010 PDH PILBUP TANAH DTR
BAWASLU KAB. SOLOK	BANK NAGARI	9000016862182504	RPL 010 PDH PILBUP SOLOK
BAWASLU KAB. SOLOK SELATAN	BANK NAGARI	9000016862182505	RPL 010 PDH PILBUP SOLSEL
BAWASLU KAB. PESISIR SELATAN	BANK NAGARI	9000016862182507	RPL 010 PDH PILBUP SIRSEL
BAWASLU KAB. PADANG PARIAMAN	BANK NAGARI	9000016862182506	RPL 010 PDHL PILBUP PDGPARIA
BAWASLU KAB SIJUNJUNG	BNI	9897436862182521	RPL 010 PDH PILBUP SIJUNJUNG
BAWASLU KAB. DHAMASRAYA	BANK NAGARI	9000016862182508	RPL 010 PDH PILBUP DHARSRA
BAWASLU KAB. KEP. MENTAWAI	BANK NAGARI	9000016862182509	RPL 010 PDH PILBUP MENTAWAI
BAWASLU KOTA BUKITINGGI	BANK NAGARI	9000016862182513	RPL 010 PDH PILBUP BUKTING
BAWASLU KOTA PADANG	BANK NAGARI	9000016862182510	RPL 010 PDH PILKOT PADANG
BAWASLU KOTA PADANG PANJANG	BRI	654266862182501	RPL 010 PDH PILKOT PDPANJANG
BAWASLU KOTA PARIAMAN	BANK NAGARI	9000016862182511	RPL 010 PDH PILKOT PARIAMAN
BAWASLU KOTA SOLOK	BANK NAGARI	9000016862182512	RPL 010 PDH PILKOT SOLOK
BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	BANK NAGARI	9000016862182514	RPL 010 PDH PILKOT PAYAKBH
BAWASLU KOTA SAWAHLUNTO	BANK NAGARI	9000016862182515	RPL 010 PDH PILKOT SAWAHLT

F.3 TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG MILIK NEGARA

Pada tanggal 7 Agustus 2014 telah terjadi pencurian kendaraan bermotor roda 2 dengan merk Yamaha new Vixion di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindak lanjuti serta telah dilaporkan kepada Bawaslu RI dan KPKNL Provinsi Sumatera Barat. Untuk hal ini telah dirapatkan serta diklarifikasi dengan Tim Pengawas Internal dan Bagian Perlengkapan dan Rumah tangga Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menentukan arah kebijakan dalam hal Aset Barang Milik Negara yang hilang. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Barat masih menunggu arahan dan putusan dari Tim Pengawas Internal dan Bagian Perlengkapan dan Rumah tangga Badan Pengawas Pemilihan Umum serta KPKNL untuk penentuan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) barang milik Negara yang hilang berupa kendaraan bermotor roda 2 merk yamaha vixion yang telah dirapatkan serta diklarifikasi dengan Tim Pengawas Internal dan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan surat nomor 075/Bawaslu-SB/SET/PL.03.03/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Tindak Lanjut.

F.4 TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

1. Hasil Audit Operasional Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana

Sesuai Laporan Hasil Audit Operasional Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 nomor 57/ND/H2PI/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan nomor LATT/H2PI/IV/2014 bulan April 2014 dan reviu kinerja BPKP tahun 2019. Terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan temuan hasil reviu BPKP pada tahun 2019 sudah sebagian besar ditindaklanjuti, namun temuan bagian pengawas internal Bawaslu RI pada tahun 2013 dan 2014 sudah ditindaklanjuti. Adapun rincian temuan hasil audit dapat dilihat pada **lampiran X**.

2. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 56/LHP/XVIII.PDG/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 atas Dana Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait sebesar Rp1.211.492.905,00 atas dana hibah Pilkada tahun 2020, sudah dilakukan Penyetoran sebesar Rp440.634.905,00 sisa Rp770.858.000,00 yang merupakan temuan atas honorarium Pengawas Kelurahan/Desa. Berikut rincian tindaklanjut atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 87. Rincian Tindak Lanjut temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

No	Temuan Pemeriksaan	Bawaslu Kabupaten/Kota	Nominal Kelebihan (Rp.)	Setor Ke Kas Negara (Rp.)	SISA	Bukti Penerimaan Negar	Keterangan (%)
1	Pertanggungjawaban atas potongan Belanja Sewa Rumah dan Meubelair pada Empat Bawaslu Kota sebesar Rp. 113.984.563,00 tidak diyakini penggunaannya.	1. Kota Padang	Rp 57.531.290,00	Rp 57.531.290,00	sdh konf dg BPK	ADA	LUNAS
		2. Kota Padang Panjang	Rp 9.980.000,00	Rp 9.980.000,00	-	ADA	LUNAS
		3. Kota Payakumbuh	Rp 13.475.000,00	Rp 13.475.000,00	-	ADA	LUNAS
		4. Kota Pariaman	Rp 30.398.273,00	Rp 30.398.273,00	-	ADA	LUNAS
			Rp 111.384.563,00	Rp 111.384.563,00			100,00%
2	Pajak belum dipungut pada Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 12.875.200,00	1. Provinsi Sumatera Bara	Rp 270.000,00	Rp 270.000,00		ADA	LUNAS
		2. Kota Padang	Rp 598.600,00	Rp 598.600,00		ADA	LUNAS
		3. Kota Padang Panjang	Rp 260.000,00	Rp 260.000,00	-	ADA	LUNAS
		4. Kota Sawahlunto	Rp 11.174.000,00	Rp 11.174.000,00	-	ADA	LUNAS
		5. Kota Pariaman	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00	-	ADA	LUNAS
		6. Kota Payakumbuh	Rp 208.600,00	Rp 208.600,00		ADA	LUNAS
		7. Kabupaten Mentawai	Rp 354.000,00	Rp 354.000,00	-	ADA	LUNAS
			Rp 12.875.200,00	Rp 12.875.200,00			100,00%
3	Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Perjalanan Dinas Untuk Biaya Penginapan sebesar Rp. 263.400.044,00	1. Kabupaten Mentawai	Rp 246.930.000,00	Rp 246.930.000,00		-	ADA LUNAS
		2. Kota Padang	Rp 5.000.044,00	Rp 5.000.044,00		-	ADA LUNAS
		3. Provinsi Sumatera Bara	Rp 4.800.000,00	Rp 4.800.000,00		-	ADA LUNAS
		4. Kota Payakumbuh	Rp 1.275.000,00	Rp 1.275.000,00	sdh konf dg BPK	ADA	LUNAS
			Rp 258.005.044,00	Rp 258.005.044,00			100,00%
4	Pertanggungjawaban Biaya Transport Perjalanan Dinas Tidak Didukung Bukti At Cost sebesar Rp. 44.050.000,00	1. Provinsi Sumatera Bara	Rp 10.715.000,00	Rp 10.715.000,00		-	ADA LUNAS
		2. Kota Pariaman	Rp 13.185.000,00	Rp 13.185.000,00		-	ADA LUNAS
		3. Kota Padang Panjang	Rp 670.000,00	Rp 670.000,00		-	ADA LUNAS
		4. Kabupaten Mentawai	Rp 19.480.000,00	Rp 19.480.000,00		-	ADA LUNAS
			Rp 44.050.000,00	Rp 44.050.000,00			100,00%
5	Administrasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Hibah Provinsi Pada Enam Bawaslu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur Belum Memadai akibatnya terdapat kekurangan penyetoran sisa Dana Hibah Provinsi pada Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Gubernur sebesar Rp. 878.098,00	1. Kota Pariaman	Rp 878.098,00	Rp 878.098,00		-	ADA LUNAS
			Rp 878.098,00	Rp 878.098,00			100,00%
6	Pembayaran Honorarium Pengawas Kelurahan/Desa pada Bawaslu Kabupaten/Kota melebihi	A Pilgub	Rp 345.400.000,00	Rp 5.970.000,00	Rp 339.430.000,00		
		B Pilkada	Rp 438.900.000,00	Rp 7.472.000,00	Rp 431.428.000,00		
			Rp 784.300.000,00	Rp 13.442.000,00	Rp 770.858.000,00		1,71%
	JUMLAH TOTAL		Rp 1.211.492.905,00	Rp 440.634.905,00	Rp 770.858.000,00		36,37%

F.5 PIPK

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penilaian Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, dengan melakukan penilaian terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak ada temuan, baik kelemahan material, kelemahan signifikan maupun kelemahan yang berdampak rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah efektif.

F.6 PENGELOLA KEUANGAN

Berdasarkan Surat keputusan ketua Bawaslu RI Nomor: 0280/K.Bawaslu/KU.01.00/VI/2017 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 110/BAWASLU-SB/SET/KU01.00/IX/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
3. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM diganti dan ditetapkan dengan SK Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 029/BAWASLU-SB/SET/KU.01.11/VI/2017 tanggal 12 September 2017;
4. Peggantian dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dari Rais Adli, A.Md. ditetapkan dengan SK No. 66-KEP Tahun 2017 tanggal 01 Oktober 2017, menjadi Wisandra Novita, S.E. dengan keputusan Kepala Sekretariat nomor 130.A/KU.01.00/SB/7/2022 tanggal 23 Juli 2022 tentang Penggantian dan Pengangkatan Bendahara pengeluaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan;
5. Pengelola Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor /KU.01.00/SB/01/2022 tanggal 3 Januari 2023

Adapun pengelola keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 88. Daftar Pejabat Perbendahraan Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat TA 2023

NO	JABATAN	NAMA	
		SEMULA	MENJADI
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Karnalis Kamaruddin, S.H, M.Si.	Karnalis Kamaruddin, S.H, M.Si.
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Eriyanti, S.H.	Eriyanti, S.H.
3	Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	Mafral, S.E, M.M.	Mafral, S.E, M.M.
4	Bendahara Pengeluaran	Rais Adli, A.Md.	Wisandra Novita, S.E.

Adapun Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 89. Daftar PPK dan BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat per 30 juni 2024

NO	KABUPATE N/ KOTA	PPK		BPP	
		NAMA	SK	NAMA	SK
Bawaslu Kategori Tipe A					
1	Kabupaten Agam	Yuli Zamra, S.Sos	059/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Syafrianto	No 160/ KP.04.00/SB/04/2023 Tanggal 14 April 2023
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Rinaldi, S.Pd.SH.,MS.i	057/KP.04.00/SB/01/2023. Tanggal 10 Januari 2023	Novalina Elsa Putri, S.IP	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
3	Kabupaten Solok	Yoni Syah Putri	047/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Arinia Mariza Della, S.Si	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
4	Kabupaten Pasaman Barat	Maityus Fajri, M.H.	045/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Dedy Yannes	NO.036C/KP.04.00/SB/01/2 023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
Bawaslu Kategori Tipe B					
5	Kabupaten Pasaman	Al Ikhwan, S.H	044/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Susi Noventi, S.E.	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
6	Kabupaten Dharmasraya	Syamsul Herman, M.A.	042/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Anjar Rosidi, S.Kom	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
7	Kabupaten Tanah Datar	Harmesyoni, S.Ag, S.Pd	039/KP.04.00/SB/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023	Herna Afriyeti, S.E.	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
8	Kabupaten 50 Kota	Mellia Rahmi, S.IP	058/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Ot Saputra, S.Sos	280/KP.04.00/SB/07/2023 TANGGAL 28 JULI 2023
9	Kabupaten Sijunjung	Dewi Lusianita, SE., M.M	043/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Nurmishbah, S.Pd	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
10	Kabupaten Solok Selatan	Admi Munandar, S.Si	047/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Gusnedi	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
11	Kabupaten Kep. Mentawai	Deni Junita Sihombing, S.Sos	043/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Muhammad Muslim	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
12	Kabupaten Padang Pariaman	Baiq Nila Ulfaini, M.P.A	059/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Fitri Mahyudin	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
13	Kota Padang	Hengky Eka Putra, S.IP	042/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Hendri Syafrul	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
14	Kota Padang Panjang	Zulhairi, M.Pdi	052/KP.04.00/SB/01/2023 tanggal 10 Januari 2023	Novlinda, M.M.	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
15	Kota Bukittinggi	Harnes Asril,SE	050/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Leni Marlina, A.Md	215/KP.04.00/SB/06/2023 TANGGAL 12 JUNI 2023
16	Kota Solok	Agustin Melta, S.Sos	056/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Rita Nofrianti, S.M.	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
17	Kota Payakumbuh	Syafrial, S.ST	054/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Ronni Busra	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
18	Kota Pariaman	Yoga Tri Rizki Ananda	209/KP.04.00/SB/06/2023 TANGGAL 7 JUNI 2023	Az Syubhi ME, A.Md	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023
19	Kota Sawahlunto	Maghfirawati Aldila, S.E.	055/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 10 JANUARI 2023	Hendri Melfin	036C/KP.04.00/SB/01/2023 TANGGAL 2 JANUARI 2023

